

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

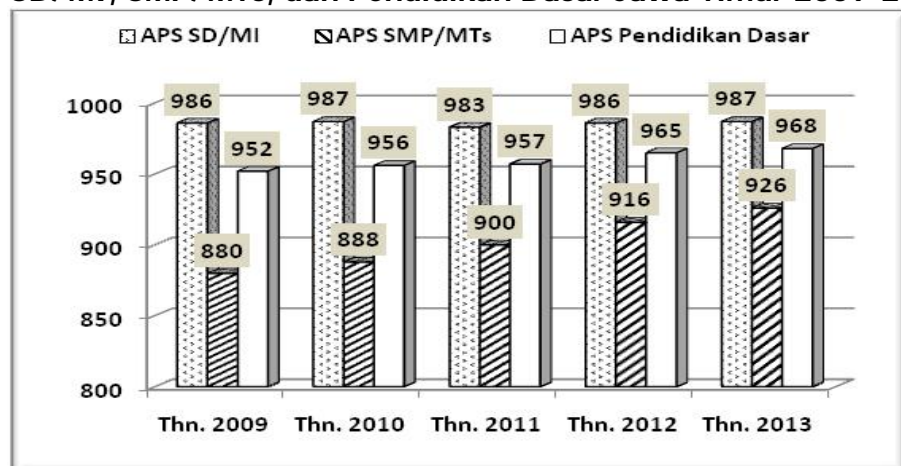
2.1.3.1.1 Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. APS sebagai indikasi bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses penduduk terhadap pendidikan.

Gambar 2.24
APS SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Dasar Jawa Timur 2009-2013



Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar untuk SD cenderung berfluktuasi, pada periode tahun 2009-2010 mengalami kenaikan dari 986 per 1.000 penduduk menjadi 987 per 1.000 penduduk. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 983 per 1.000 penduduk, selanjutnya meningkat kembali hingga tahun 2013 mencapai 987 per 1.000 penduduk. Untuk APS tingkat SMP/MTs menunjukkan kenaikan tiap tahunnya, yaitu dari 880 per 1.000 penduduk pada tahun 2009 menjadi 926 per 1.000 penduduk pada tahun 2013, demikian APS pendidikan dasar juga mengalami peningkatan dari 952 per 1.000 penduduk menjadi 968 per 1.000 penduduk pada tahun 2013.

b. Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat adalah jumlah sekolah tingkat dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di Jawa Timur dalam periode tahun 2009-2013 walau berfluktuatif namun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2009 dari 57 per 1000 penduduk menjadi 61 per 1000 penduduk pada tahun 2013. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar melalui penyediaan sarana belajar bagi anak usia sekolah.

Tabel 2.28
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap
Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	26.830	26.279	25.996	26.554	27.664
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	3.929.141	3.941.708	4.055.928	3.983.295	4.055.766
1.3.	Rasio (Per 10.000)	68	67	64	67	68
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	6.025	6.347	6.465	6.996	8.313
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	1.821.047	1.860.266	1.849.280	1.747.931	1.849.207
2.3.	Rasio (Per 10.000)	33	34	35	40	45
3	Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	32.855	32.626	32.461	33.550	35.977
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-15 tahun	5.750.188	5.801.974	5.905.208	5.731.226	5.904.973
3.3.	Rasio (Per 10.000)	57	56	55	59	61

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah

ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan.

Perkembangan Rasio guru murid selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan tiap tahunnya, untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2013 sebesar 89 per seribu ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid, sedangkan pada sekolah setingkat SLTP sebesar 92 per seribu, yang berarti bahwa setiap guru mengajar anak sekitar 11 murid. Secara umum pada jenjang pendidikan dasar sebesar 90 per seribu, hal ini berarti setiap guru mengajar sekitar 12 murid.

Tabel 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	283.929	289.808	298.475	291.963	351.137
1.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)	3.743.372	3.769.526	3.726.563	3.927.336	3.967.582
1.3.	Rasio (per 1.000)	76	77	80	74	89
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	150.397	114.287	149.162	156.365	170.283
2.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah)	1.272.703	1.305.374	1.327.254	1.600.718	1.849.207
2.3.	Rasio (per 1.000)	118	88	112	98	92
3	Pendidikan Dasar SD/MI - SMP/MTs					
3.1.	Jumlah Guru	434.326	404.095	447.637	448.328	521.420
3.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-15 thn Sedang Sekolah)	5.016.075	5.074.900	5.053.817	5.528.054	5.816.789
33.	Rasio (per 1.000)	87	80	89	81	90

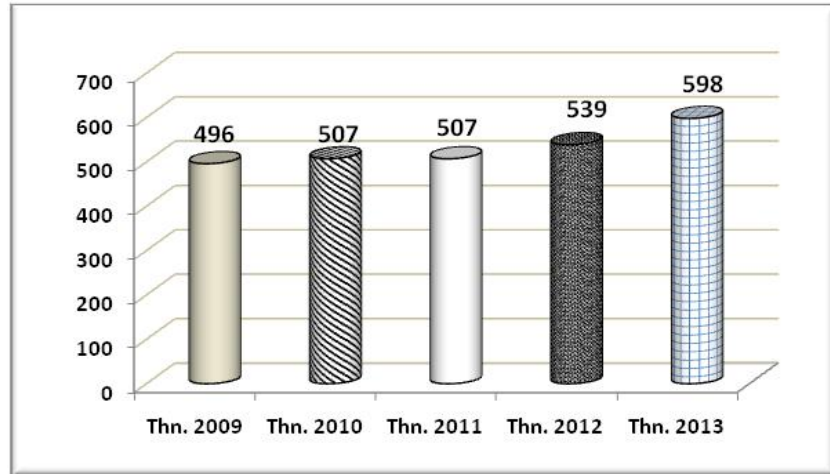
Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS Pendidikan Menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. APS di tingkat pendidikan menengah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Gambar 2.25
APS Pendidikan Menengah Jawa Timur 2009-2013



Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di Jawa Timur untuk anak usia 16-19 tahun kurun waktu 2009 - 2013 menunjukkan nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2009 APS usia 16-19 tahun sebesar 496 dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 menjadi 539 per 1.000 penduduk usia 16-19 tahun dan meningkat kembali menjadi 598 pada tahun 2013.

Era globalisasi dan pasar bebas (ASEAN Economic Community/AEC 2015) diyakini akan menumbuhkan dunia industri yang sangat pesat. Kebutuhan akan tenaga kerja kedepan menuntut tenaga kerja yang mempunyai kemampuan spesifik yang berasal dari sekolah kejuruan sebagai tenaga terampil di sektor industri. Pelayanan pendidikan menengah kejuruan yang memberikan kemampuan vokasional dan profesional kepada para lulusannya untuk segera memasuki pasar kerja belum tersedia secara memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sebarannya pun belum merata. Adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan sekolah kejuruan dengan yang dibutuhkan Dunia Usaha/Dunia Industri memerlukan penanganan tersendiri sehingga serapan tenaga kerja di dunia usaha/industri dapat optimal.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Tabel 2.30
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2013

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA)					
1.1.	Jumlah sekolah	3.299	3.482	3.615	5.345	5.372
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	2.168.072	2.162.292	2.238.998	2.451.640	1.742.716
1.3.	Rasio (per 10.000)	15	16	16	22	31

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio ketersediaan sekolah SLTA sederajat tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2009 setiap 10.000 penduduk usia 16-19 tahun tersedia 15 sekolah sedangkan pada tahun 2013 tersedia 31 sekolah ini berarti pada tahun 2009 setiap sekolah menampung sekitar 657 murid dan pada tahun 2013 menampung sekitar 324 murid. Hal ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah juga meningkat.

c. Rasio Guru terhadap Murid

Seperti halnya pada pendidikan dasar, Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, Sejak tahun 2009 rasio guru terus menurun hingga tahun 2012, yaitu dari 992 menjadi 855 per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah (16-19 tahun), kemudian tahun 2013 kembali meningkat menjadi 960, ini berarti bahwa pada tahun 2013 seorang guru membawahi sekitar 10 murid. Oleh karena itu arah kebijakan pendidikan pada RPJMD tahun 2014-2019 salah satunya diarahkan pada Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata, untuk mengantisipasi menurunnya mutu pendidikan karena beban guru semakin besar

Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA) usia 16-19 Tahun					
1.1.	Jumlah Guru	106.602	106.199	107.312	112.954	130.810
1.2.	Jumlah Murid	1.074.898	1.095.768	1.136.246	1.321.620	1.362.972
1.3.	Rasio (per 10.000)	992	969	944	855	960

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

3. Fasilitas Pendidikan

a. Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik.

Tabel 2.32
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan
Pada Sekolah SD Sederajat Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Ruang kelas kondisi baik	91.677	94.881	107.497	99.988	121.678
2	Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	47.763	39.401	36.590	39.212	32.431
3	Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	29.535	29.439	26.487	27.417	25.269
4	Jumlah Ruang Kelas	168.975	163.721	170.574	166.617	179.378
5	Persentase Ruang kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan	82,52	82,02	84,47	83,54	85,91

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Perkembangan jumlah ruang kelas untuk sekolah setingkat SD sederajat dalam kurun waktu 2009 – 2013 berkisar antara 160 ribu hingga 179 ribu kelas. Dari jumlah ruang kelas keseluruhan rata-rata sekitar 80 persen kondisinya baik (baik dan rusak ringan) sementara sekitar 20 persen kondisinya rusak berat.

b. Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Perkembangan kondisi ruang kelas sekolah setingkat SLTP dan SLTA sederajat kondisinya lebih baik jika dibanding pada sekolah setingkat SD sederajat. Untuk sekolah setingkat SLTP sederajat dalam lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) yang kondisinya baik (baik dan rusak ringan) rata-rata sekitar 95 persen, sedangkan sekolah setingkat SLTA sederajat dalam lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) yang kondisinya baik (baik dan rusak ringan) rata-rata sekitar 97 persen.

Tabel 2.33
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada Sekolah SLTP Sederajat dan SLTA Sederajat di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Pendidikan SLTP Sederajat						
1	Ruang kelas kondisi baik	38.881	40.945	41.350	58.687	64.489
2	Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	5.231,83	5.858	7.223	9.590	5.754
3	Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	2.614	2.134	2.127	3.535	2.495

4	Jumlah Ruang Kelas	46.727	48.937	50.700	71.812	72.738
5	Persentase Ruang kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan	94,41	95,64	95,80	95,08	96,57
Sekolah Pendidikan SLTA Sederajat						
1	Ruang kelas kondisi baik	25.172	27.468	27.538	30.982	31.400
2	Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	2.099	2.449	2.611	2.957	2.556
3	Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	720	712	722	862	912
4	Jumlah Ruang Kelas	27.991	30.629	30.871	34.801	34.868
5	Persentase Ruang kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan	97,43	97,68	97,66	97,52	97,38

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.34
Jumlah Lembaga, Murid, Tenaga Pendidikan PAUD
di Jawa Timur Tahun 2011-2013

No.	Komponen	Satuan	Tahun		
			2011	2012	2013*)
1	Pend Usia 4-6 tahun	Orang	1.793.930	1.973.323	-
	Pend Usia 3-6 tahun	Orang	-	-	2.423.240
2	Siswa	Orang	995.422	973.497	1.410.568
	a. TK	Orang	808.947	754.094	748.397
	b. RA	Orang	186.475	219.403	
3	Guru	Orang	80.042	86.432	70.418
	a. TK	Orang	64.431	70.121	61.125
	b. RA	Orang	15.611	16.311	
4	Sekolah	Lembaga	21.741	22.347	18.217
	a. TK	Lembaga	17.353	17.691	16.055
	b. RA	Lembaga	4.388	4.656	
5	Kelas	Kelas	51.653	55.286	48.731
	a. TK	Kelas	43.357	46.162	45.874
	b. RA	Kelas	8.296	9.124	

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan

2010/2011–2011/2012– 2012/2013 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Keterangan : *) angka sementara

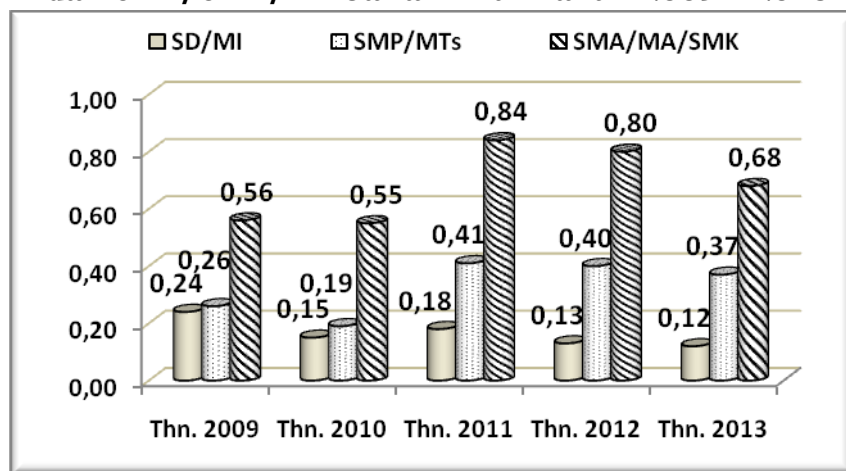
Selama tiga tahun terakhir jumlah lembaga PAUD terus bertambah dari 21.741 lembaga tahun 2011 bertambah menjadi 22.347 lembaga tahun 2012 dan angka sementara tahun 2013 sebesar 18.217 lembaga. Begitu pula jumlah siswa PAUD dari 995.422 siswa pada tahun 2011 terus meningkat hingga menjadi sebanyak 1.410.568 siswa pada tahun 2013. Sedangkan untuk

tenaga pendidik PAUD pada tahun 2011 sebanyak 80.042 orang bertambah menjadi 86.432 orang pada tahun 2012 dan tahun 2013 angka sementara tenaga pendidik PAUD sebanyak 70.418 orang.

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Gambar 2.26
Grafik Angka Putus Sekolah Pada Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Jawa Timur Tahun 2009 – 2013



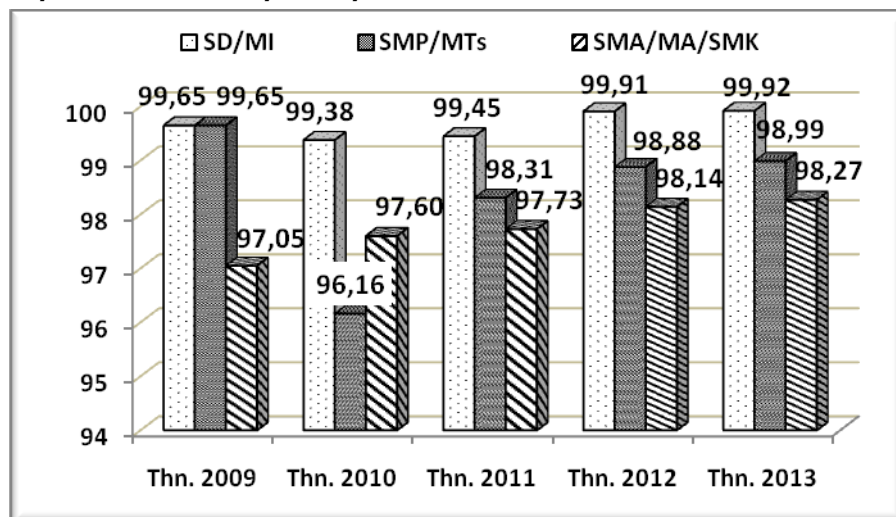
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Perkembangan angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun SD/MI selama kurun waktu tahun 2009 - 2013 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2009 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,24 persen dan semakin menurun hingga mencapai sebesar 0,13 persen pada tahun 2012, dan menurun kembali menjadi 0,12 pada tahun 2013. Sedangkan untuk angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun SMP/MTs menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada tahun 2009 sebesar 0,26 persen dan meningkat hingga pada tahun 2012 sebesar 0,40 persen, dan menurun kembali menjadi 0,37 pada tahun 2013. Demikian halnya untuk tingkat SMA/SMK/MA angka putus sekolah penduduk usia 16-18 tahun, dimana tahun 2009 sebesar 0,56 persen dan meningkat hingga sebesar 0,68 persen pada tahun 2013, dengan kata lain dalam tiap 1000 anak usia 16-18 tahun terdapat sekitar 6 anak yang putus sekolah.

6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi bagi sekolah yang bersangkutan.

Gambar 2.27
Angka Kelulusan Pada Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Jawa Timur Tahun 2009 – 2013



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

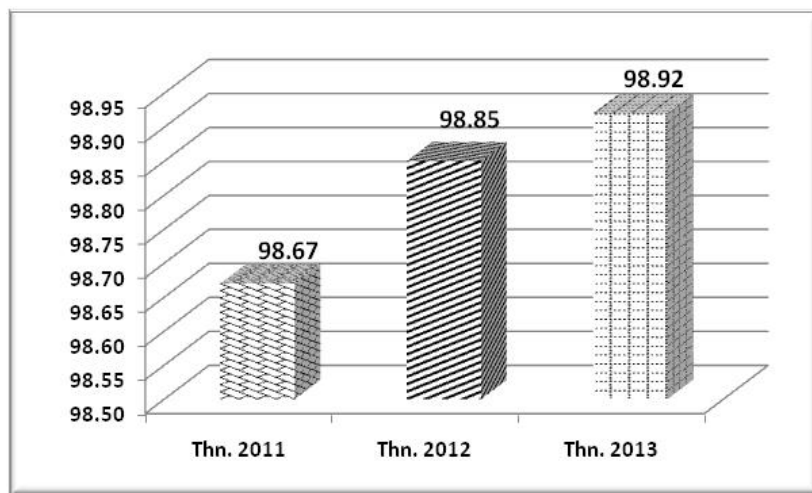
Perkembangan kelulusan sekolah SD/MI Selama kurun waktu tahun 2009-2013 angkanya berfluktuasi, pada tahun 2009 mencapai 99.65 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 99.38, selanjutnya terus naik hingga tahun 2013 mencapai 99.92 persen. Berbeda halnya dengan angka kelulusan sekolah SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuasi, pada tahun 2009 sebesar 99,65 persen menjadi 98.99 persen pada tahun 2013. Sedangkan angka kelulusan sekolah setingkat SMA/SMK/MA angka kelulusannya dalam lima tahun terakhir terus meningkat, tahun 2009 sebesar 97,05 persen terus meningkat menjadi 98,27 persen pada tahun 2013.

a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya. Angka melanjutkan akan meningkat jika diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan. Angka

melanjutkan sekolah dari jenjang yang rendah ke jenjang di atasnya pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Dengan tingginya pendidikan masyarakat akan membawa kemajuan pada suatu wilayah.

Gambar 2.28
Angka Melanjutkan Pada Jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs di Jawa Timur Tahun 2011 – 2013



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs di Jawa Timur pada tahun 2013 terjadi peningkatan, walupun peningkatannya kecil, yaitu pada tahun 2012 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 98.85 persen menjadi 98.92 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap 100 anak lulusan SD/MI terdapat sekitar 1 anak yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs.

Tabel 2.35
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

Kabupaten/kota	Tahun		2013
	2011	2012	
Kabupaten			
01. Pacitan	99,04	99,34	99,76
02. Ponorogo	99,17	99,21	99,57
03. Trenggalek	98,73	98,87	99,77
04. Tulungagung	98,48	98,91	99,51
05. Blitar	98,57	98,73	99,47
06. Kediri	99,56	99,61	99,92
07. Malang	98,43	98,96	99,40
08. Lumajang	98,56	98,76	99,85
09. Jember	98,12	98,19	99,32
10. Banyuwangi	98,99	99,03	99,37
11. Bondowoso	97,96	98,01	99,19
12. Situbondo	98,02	98,07	98,96
13. Probolinggo	97,88	97,90	99,25

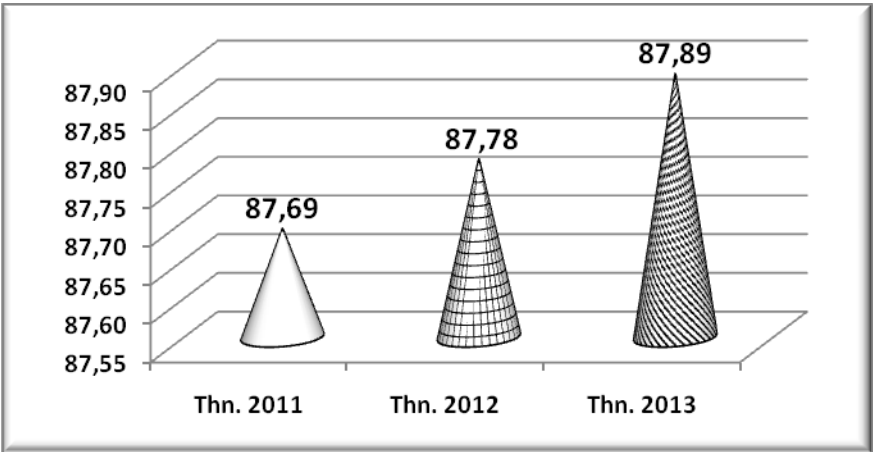
14. Pasuruan	98,59	98,82	98,92
15. Sidoarjo	98,65	98,80	98,98
16. Mojokerto	98,42	98,92	99,22
17. Jombang	99,08	99,23	99,06
18. Nganjuk	99,16	99,49	99,03
19. Madiun	98,94	99,02	98,99
20. Magetan	98,66	98,77	99,23
21. Ngawi	98,75	98,91	99,37
22. Bojonegoro	98,32	98,64	99,63
23. Tuban	98,82	98,96	99,51
24. Lamongan	99,08	99,16	98,91
25. Gresik	99,32	99,36	99,07
26. Bangkalan	98,05	98,11	98,91
27. Sampang	97,20	97,21	99,01
28. Pamekasan	98,06	98,14	99,02
29. Sumenep	97,24	97,36	97,95
Kota			
30. Kediri	99,37	99,48	99,06
31. Blitar	99,63	99,89	98,11
32. Malang	99,15	99,50	98,15
33. Probolinggo	99,67	99,82	98,24
34. Pasuruan	99,09	99,35	99,11
35. Mojokerto	99,15	99,43	98,19
36. Madiun	99,62	99,76	97,52
37. Surabaya	99,57	99,74	97,73
38. Batu	99,01	99,28	98,27
Jawa Timur	98,67	98,85	98,92

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

b. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA adalah persentase dari jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs tahun ajaran sebelumnya

Gambar 2.29
Angka Melanjutkan Pada Jenjang pendidikan
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Jawa Timur Tahun 2011 – 2013



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Perkembangan angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK/MA jauh lebih rendah dibanding pada SD/MI ke SMP/MTs yaitu pada tahun 2012 sebesar 87,78 persen menjadi 87.89 persen pada tahun 2013. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa setiap 100 anak lulusan SMP/MTs terdapat sekitar 12 anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA.

Tabel 2.36
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

Kabupaten/kota	Tahun		2013
	2011	2012	
Kabupaten			
01. Pacitan	78,87	92,05	92,05
02. Ponorogo	87,88	90,82	90,82
03. Trenggalek	79,06	92,84	92,84
04. Tulungagung	89,05	93,48	93,48
05. Blitar	86,48	95,37	95,37
06. Kediri	86,80	96,72	96,72
07. Malang	86,81	93,89	93,89
08. Lumajang	89,82	92,00	92,00
09. Jember	87,86	91,11	91,11
10. Banyuwangi	89,34	91,97	91,97
11. Bondowoso	79,70	93,08	93,08
12. Situbondo	89,60	89,19	89,19
13. Probolinggo	83,75	91,32	91,32
14. Pasuruan	82,85	92,35	92,35
15. Sidoarjo	92,39	86,00	86,00
16. Mojokerto	88,32	90,27	90,27
17. Jombang	90,77	86,89	86,89
18. Nganjuk	81,48	85,58	85,58
19. Madiun	86,26	88,36	88,36
20. Magetan	87,73	88,31	88,31
21. Ngawi	84,44	81,75	81,75
22. Bojonegoro	91,36	87,13	87,13
23. Tuban	85,54	82,92	82,92
24. Lamongan	89,95	86,93	86,93
25. Gresik	91,52	89,47	89,47
26. Bangkalan	78,37	82,08	82,08
27. Sampang	78,00	87,11	87,11
28. Pamekasan	82,24	84,45	84,45
29. Sumenep	81,55	83,84	83,84
Kota			
30. Kediri	92,33	90,29	90,29
31. Blitar	95,21	79,90	79,90
32. Malang	90,18	89,64	89,64
33. Probolinggo	90,56	87,97	87,97
34. Pasuruan	92,26	89,70	89,70
35. Mojokerto	93,65	82,33	82,33
36. Madiun	91,34	78,53	78,53
37. Surabaya	91,77	81,60	81,60
38. Batu	89,18	79,02	79,02
Jawa Timur	87,69	87,78	87,89

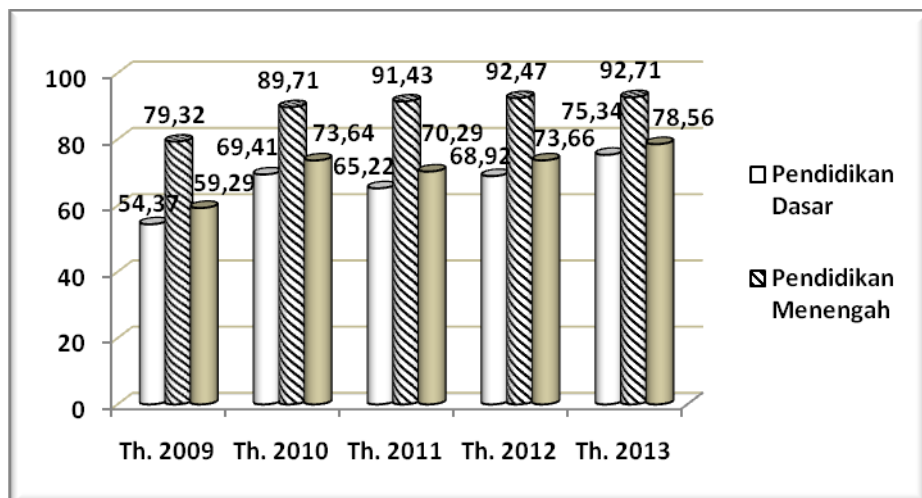
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

c. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah persentase dari jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV terhadap jumlah guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Perkembangan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang Pendidikan Dasar dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, dari 54,37 persen pada tahun 2009 menjadi 75.34 persen pada tahun 2013. Begitu juga pada jenjang Pendidikan Menengah terjadi peningkatan, dari 79,32 persen pada tahun 2009 menjadi 92,71 persen pada tahun 2013. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang Pendidikan Menengah jumlahnya lebih tinggi jika dibanding pada Pendidikan Dasar. Secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1- S1/D-IV terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan tuntutan jaman serta adanya sistem sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya

Gambar 2.30
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV Pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs), Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) dan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.1.3.1.2 Kesehatan

1. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan diare dan gizi (melakukan penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita).

Tabel 2.37
Jumlah Posyandu dan Balita di Jawa Timur Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Posyandu	45.603	45.637	45.870	46,016
Jumlah Balita	2.923.910	3.132.404	3.116.861	3,072,582
Rasio Posyandu	15,60	14,57	14,72	14.98

Sumber: Dinas Kesehatan Prov Jatim dan BPS

Perkembangan rasio posyandu per satuan balita selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, rasio posyandu terhadap balita sebesar 15,6 dan mengalami penurunan menjadi 14,57 di tahun 2011. Pada tahun 2012, rasio posyandu terhadap balita mengalami peningkatan 0,15 poin dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 14,98.

2. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Jawa Timur pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu dari 99,16 menjadi 91,36.

Tabel 2.38
Jumlah Penderita TBC Baru Menurut Kriteria di Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	18.119	19.599	21.475	20.157	23,703
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	17.433	19.130	20.452	20.327	41,001
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	103,94	102,45	105,00	99,16	91.36

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota Se Jawa Timur

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas kesehatan. Selama 5 tahun terakhir, rasio puskesmas, poliklinik dan pustu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, rasio tersebut sebesar 0,108 dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan 0,002 poin. Sementara pada tahun 2012, rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,002 poin atau menjadi 0,108. Penurunan ini didominasi akibat berkurangnya poliklinik di Kabupaten Jember, Jombang dan Kota Malang. Angka 0,108 menunjukkan bahwa setiap 0,108 unit (puskesmas, poliklinik dan pustu) melayani setiap 1.000 penduduk. Pada tahun 2013 jumlah rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu sebesar 0,107 atau mengalami penurunan sebesar 0,001 poin. Hal ini karena jumlah fasilitas tersebut tetap di satu sisi jumlah penduduk terus bertambah.

Tabel 2.39
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Jawa Timur
Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	3.902	4.036	4.150	4.093	4.093
Jumlah Penduduk	36.015.370	37.476.757	37.687.622	38.052.950	38.318.791
Rasio	0.108	0,108	0,110	0,108	0.107

Sumber: Dinkes Kab/ Kota dan BPS

4. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit di Jawa Timur terbagi dalam 4 kategori pengelolaan yaitu Pemerintah (Kabupaten/Kota/Provinsi), TNI/Polri, BUMN dan Swasta. Jumlah rumah sakit pada tahun 2013 sebesar 355 rumah sakit atau bertambah sebesar 9 rumah sakit dalam kurun waktu setahun. Peningkatan tersebut terjadi pada rumah sakit BUMN sebanyak 1 rumah sakit dan swasta 8 rumah sakit. Peningkatan jumlah rumah sakit tersebut menggambarkan adanya upaya pemenuhan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Rasio rumah sakit terhadap penduduk pada tahun 2013 sebesar 0,0926 atau mengalami peningkatan sebesar 0,0014 poin dari tahun sebelumnya. Angka rasio tersebut menunjukkan setiap 10.000 penduduk akan dilayani 0,093 unit rumah sakit.

Tabel 2.40
Jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur Tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
Rumah Sakit Pemerintah	64	66	66
Rumah Sakit TNI/Polri	28	28	27
Rumah Sakit BUMN	12	13	14
Rumah Sakit Swasta	226	240	248
Jumlah Rumah Sakit	330	347	355
Jumlah Penduduk	37.687.622	38.052.950	38.318.791
Rasio	0,0876	0,0912	0.0926

Sumber: Dinas Kesehatan Prov Jatim dan BPS

5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun terhadap jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Penderita DBD di Jawa Timur mencapai 14.682 kasus pada tahun 2013. Kasus pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6.141. Sementara itu cakupan dan penanganan penderita DBD pada tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan setiap 100 kasus DBD ada 100 jiwa yang mendapat penanganan.

Tabel 3.41
Jumlah dan Penanganan DBD di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	15.730	20.502	4.495	6.117	14,682
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	15.660	21.812	4.495	6.141	14,682
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,45	93,99	100,00	99,61	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota Se Jawa Timur

6. Cakupan Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan. Cakupan puskesmas adalah persentase jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Jumlah puskesmas di Jawa Timur pada tahun 2013 sebanyak 960 puskesmas yang tersebar di 662 kecamatan. Angka cakupan puskesmas sebesar 145,02 persen atau setiap 100 kecamatan yang ada akan dilayani

oleh 145 puskesmas. Keberadaan puskesmas yang menjangkau semua kecamatan akan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Kondisi ini akan memberikan dukungan terhadap pencapaian pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau semua pelosok di Jawa Timur.

Tabel 3.42
Jumlah dan Cakupan Puskesmas di Jawa Timur
Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Jumlah Puskesmas	956	960	960
Jumlah Kecamatan	662	662	662
Cakupan Puskesmas (%)	144,41	145,02	145,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

7. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Kecukupan keterbandingan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter.

Pada tahun 2012, jumlah dokter yang ada di Jawa Timur sebanyak 11.412 orang atau mengalami peningkatan 0,96 persen dari tahun sebelumnya. Keterbandingan jumlah dokter terhadap jumlah penduduk atau rasio dokter sebesar 0,2999 di tahun 2011 dan turun 0,0001 poin pada tahun 2012 atau menjadi 0,2998. Angka 0,2999 menunjukkan setiap 0,2999 dokter akan melayani seribu penduduk atau 2,9 dokter akan melayani sepuluh ribu penduduk.

Tabel 2.43
Jumlah dan Rasio Dokter di Jawa Timur
Tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012
Jumlah Dokter	11.303	11.412
Jumlah Penduduk	37.687.622	38.052.950
Rasio	0,2999	0,2998

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

8. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu (pustu) adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Jumlah pustu yang ada di Jawa Timur sebanyak 2.279 unit di tahun 2011 dan menjadi 2.274 unit di tahun 2013. Keberadaan pustu ini belum tersebar di semua desa yang ada di Jawa Timur. Hal ini dapat ditunjukkan dari angka cakupan pembantu puskesmas yang mencapai 26,81 persen di tahun 2011 dan pada tahun 2013 mencapai 26,74 persen.

Tabel 4.44
Jumlah dan Cakupan Puskesmas Pembantu di Jawa Timur
Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Jumlah Puskesmas Pembantu	2.279	2.274	2,274
Jumlah Desa	8.502	8.503	8,505
Cakupan Pustu (%)	26,81	26,74	26.74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Jawa Timur adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang/massal yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Proporsi panjang jalan dalam Kondisi Baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara, Pelabuhan dan Kereta Api maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana Pendidikan maupun Kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Tabel 2.45
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan di Jawa Timur
Tahun 2009 – 2013 (km)

Status Jalan	2009		2010		2011		2012		2013	
	Panjang (Km)	Kondisi Baik	Panjang (Km)	Kondisi Baik	Panjang (Km)	Kondisi Baik	Panjang (Km)	Kondisi Baik	Panjang (Km)	Kondisi Baik
Kab/Kota	31,593.30	17,486.03	33,938.03	23,411.91	34,183.46	27,759.70	34,183.46	27,027.21	34,183.46	27,027.21
Provinsi	2.000.98	1.602.70	2.000.98	1.548.42	1.760.91	1.376.28	1.760.91	1.509.64	1,760.91	1,509.81
Nasional	2.027.01	1,831.12	2.027.01	1,843.77	2.027.01	1,857.98	2.027.01	1,857.98	1,934.23	1,841.63
Jumlah	31,593.30	19,317.15	33,938.03	25,255.68	34,183.46	29,617.68	34,183.46	28,885.19	37,878.60	30,378.65

Sumber : 1. Dinas PU Bina Marga Kab/Kota
2. Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim
3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

Secara garis besar total panjang kondisi jalan dalam keadaan baik telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan tajam pada total kondisi jalan dalam keadaan baik, dari 61,14% di tahun 2009 menjadi 80,20% di tahun 2013. Pertumbuhan total panjang jalan tertinggi terjadi di tahun 2010 sebesar 13,27% atau sepanjang 2.344,73 Km dari kondisi semula pada tahun 2009.

Kebutuhan adanya pertambahan panjang jalan maupun pertambahan Panjang Jalan dalam kondisi baik, sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan, baik itu pada jalan Nasional yaitu Jalan Tol/NonTol/Flyover, jalan Provinsi maupun pada jalan Kabupaten/Kota. Kebutuhan tersebut merupakan konsekwensi dari tingginya aktivitas perekonomian masyarakat yang tercermin pada tingginya Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. Hal tersebut juga menggambarkan telah terjadi peningkatan aktivitas perdagangan yang berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan permintaan kendaraan bermotor yang cukup tajam.

Untuk mendukung program strategis nasional, yaitu pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang melintasi delapan Kabupaten sepanjang pantai Selatan, telah dilaksanakan sharing pembiayaan antara APBN, APBD Provinsi dan delapan APBD Kabupaten. Permasalahan yang hingga saat ini belum selesai belum selesai adalah pembebasan lahan milik Perum Perhutani dan Masyarakat.

Ganti rugi penggunaan tanah milik Perhutani pada awalnya memang sangat sulit dilakukan, namun dengan terbitnya surat dispensasi dari Kementerian Kehutanan, peningkatan percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur disejumlah Kabupaten dapat segera dilaksanakan. Percepatan pembebasan lahan pembangunan JLS tersebut akan dapat lebih cepat tuntas jika diselesaikan langsung ditingkat Kementerian Kehutanan melalui jalur GoG atau “government to government”. Progres pembebasan lahan kompensasi saat ini untuk Kabupaten Pacitan telah tuntas tahun 2013 yang diharapkan segera diikuti tuntasnya pembangunan fisik jalan (APBN) yang akan tuntas tahun 2014, sedangkan penggantian lahan kabupaten Trenggalek akan tuntas 2015. Upaya peningkatan percepatan pembangunan JLS ini, selain tergantung pada percepatan penggantian lahan milik Perhutani juga tergantung pada kepastian penetapan trase agar dapat segera dilakukan pengukuran.

Tabel 2.46
Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

NO	KABUPATEN	KAWASAN HUTAN			LAHAN KOMPENSASI	
		LUAS PERSETUJUAN PRINSIP (Ha)	LUAS HASIL PENGUKURAN (Ha)	DISPENSASI (Ha) BERLAKU S/D	TERLETAK DI	LUAS (Ha)
1	PACITAN	17,891	17,8906	17,6227 No. 17/Menhut-VII/2013, tgl. 30 Juni 2013	Ds. Jeruk, Kec. Bandar, Kab. Pacitan	17,891 (TUNTAS 2013)
2	TRENGGALEK	111,744	Belum dilaksanakan pengukuran	-	Ds. Cangkring dan Walidono, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso	75,887 (TUNTAS 2014)
3	TULUNGAGUNG	116,8647	116,8647	-	Ds. Wonobojo dan Leprak, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso	19,51
4	BLITAR	109,0015	109,0015	34,3720 SK. 24/Menhut-II/2011 berlaku s/d tgl. 15 Juni 2011	-	-
5	MALANG	148,14	147,083	89,7951 S.638/Menhut-VII/2013 berlaku s/d tgl. 30 Mei 2015	Ds. Gentong, Kec. Tamankrocok, Kab. Bondowoso	150,00
6	LUMAJANG	29,6124	29,6124	29,6124 S.522/Menhut-VII/2013 berlaku s/d tgl. 31 Mei 2013	-	-
7	JEMBER	73,3392	73,3392	73,3392 S.521/Menhut-VII/2012 berlaku s/d tgl. 22 Juni 2013	-	-
8	BANYUWANGI	27,3984	27,3984	27,3984 S.519/Menhut-VII/2012 berlaku s/d tgl. 19 Ags 2013	Ds. Bangsring, Kec. Wongsorejo dan Ds. Wonorejo, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi	27,29

(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi, data diolah), Desember 2013

2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan /peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 2.47
Tempat Ibadah di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Tempat Ibadah	Tahun				
	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
Jumlah Tempat Ibadah	194.860	199.708	202.644	203.538	204.432
Rasio per 1.000 penduduk	5,23	5,33	5,38	5,35	5,34

Sumber : Depag Kab/Kota Se Jawa Timur

Keterangan : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara

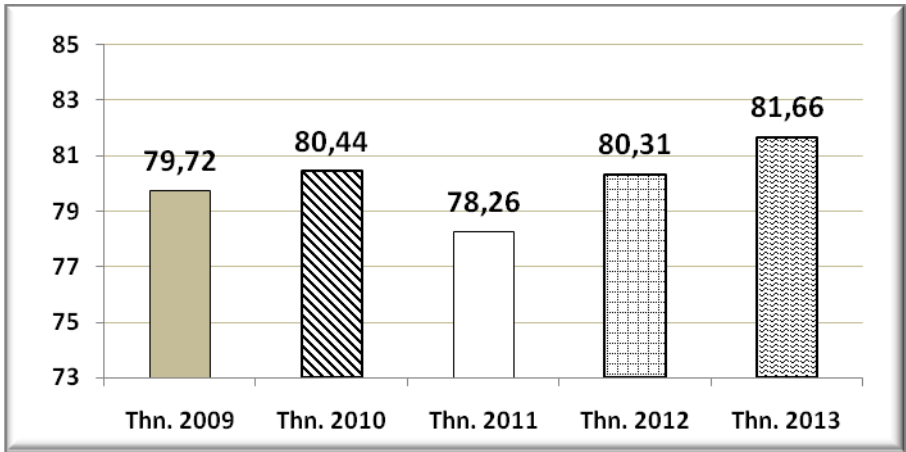
Perkembangan tempat beribadah umat beragama pada tahun 2012 sekitar 203.538 buah dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 204.432 buah. Tempat ibadah tersebut meliputi masjid (19,29 persen), musholla (79,14 persen), gereja (1,30 persen), pura (0,18 persen), vihara (0,07 persen), dan klenteng (0,02 persen). Selama periode tahun 2009-2013 rasio tempat ibadah masih sekitar 5 tempat ibadah per seribu penduduk.

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik, dimana orang menggunakannya sebagai tempat berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sarana tersebut antara lain ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan alami, konstruksi bangunan, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan kotoran manusia, dan penyediaan air bersih.

Secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 80,31 persen tahun 2012 menjadi 81,66 persen pada tahun 2013. Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi tentunya akan meningkatkan pula tingkat kesehatan masyarakat.

Gambar 2.31
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.3.1.4 Perumahan

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah jumlah rumah tangga pengguna air bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2009-2013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 93,15 persen dan meningkat menjadi sekitar 94,96 persen di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 5,04 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

Tabel 2.48
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	Tahun	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga
1	2009	93,15	11.187.245
2	2010	93,73	10.483.105
3	2011	93,42	10.555.938
4	2012	94,53	10.686.958
5	2013	94,96	10,521,361

Keterangan : Air Bersih (AIR MINUM) meliputi : Air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung

2. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2009. Sampai dengan

tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.049 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 252.951 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.49
Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013

NO	K E G I A T A N	Jumlah kab/kota	Target Renovasi RTLH (unit)	Realisasi Renovasi RTLH (unit)
1.	Tahun 2009 (Tahap I & II)	20	20.000	20.000
2.	Tahun 2010 (Tahap III & IV)	20	15.000	15.045
3.	Tahun 2011 (Tahap V & VI)	20	15.000	15.106
4.	Tahun 2012 (Tahap VII & VIII)	14	11.400	11.498
5.	Tahun 2013 (Tahap IX)	12	9.400	9.400
TOTAL			70.800	71.049

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

3. Pembangunan Rumah Sederhana Tapak (RST)

Pembangunan Rumah Sederhana Tapak RST di Jawa Timur sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 169.176 unit RST dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.50
Pelaksanaan Pembangunan RST Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013

Tahun	Target (unit)	Realisasi (Unit)	Realisasi s/d Tahun (Unit)
2009	15.000	12.835	94.583
2010	15.000	14.000	108.583
2011	15.000	19.250	127.833
2012	25.000	20.182	148.015
2013	25.000	21.161	169.176

Sumber : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov. Jatim

4. Pembangunan RUSUNAWA

Untuk menyediakan hunian yang sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) sebanyak 9 (sembilan) Blok terdiri dari 485 unit hunian.

Tabel 2.51
Realisasi Pembangunan Rusunawa Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 – 2013

No	Tahun	Rusunawa	Jumlah Blok	Jumlah Hunian
1.	2010/2011	Gunungsari Surabaya	3 Blok	268 hunian
2.	2011/2012	Jemundo Sidoarjo	4 Blok	152 hunian
		SIER Surabaya	2 Blok	65 hunian
	TOTAL		9 Blok	485 hunian

Sumber : Dinas PU CK Prov Jatim

Pada tahun 2010/2011 telah terbangun sebanyak 3 (tiga) Blok Rusunawa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, dan pada tahun 2011/2012 telah dibangun sebanyak 6 (enam) Blok yang terdiri dari Rusunawa Jemundo sebanyak 4 (empat) Blok dengan jumlah hunian 152 unit dan Rusunawa SIER sebanyak 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit, beserta sarana dan prasarana lingkungannya.

2.1.3.1.5 Penataan Ruang

Pelayanan dasar bidang penataan ruang kepada masyarakat yaitu Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Penyediaan informasi tata ruang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2008 melalui Sistem Informasi Tata Ruang (<http://sitr.jatimprov.go.id/>).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk penyediaan peta analog sudah ada pada tiap Kabupaten/Kota walaupun penyediaannya terbatas. Untuk penyediaan peta digital, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan portal pada website yang dapat diunduh pada Sistem Informasi Tata Ruang (<http://sitr.jatimprov.go.id/>)

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Tingkat kualitas hidup suatu kota, pada dasarnya dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tercukupinya fasilitas umum yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat, mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas hidup masyarakat di perkotaan tersebut. Salah satu fasilitas umum perkotaan yang

digunakan sebagai indikator dalam mengetahui kualitas hidup perkotaan adalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Perkotaan dengan kualitas hidup baik adalah perkotaan yang menyediakan RTH sesuai dengan kebutuhan penduduknya, atau minimal sesuai dengan standar minimum tertentu, agar setiap penduduk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mudah.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan telah menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota, dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Jawa Timur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebutuhan RTH kawasan perkotaan di wilayah Jawa Timur adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Tabel 2.52
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun 2011 s.d 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012* (Ha)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	103.545,50	106.131.07
2.	Luas Kawasan Perkotaan	542.770,48	542.770,48
3.	Luas Wilayah	4.779.975	4.779.975
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,1907	0,1955

Sumber: Rekapitulasi RTRW Kabupaten/ Kota Se Jatim (*Angka bersifat sementara)

Kebutuhan RTH 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/kawasan perkotaan. Pembagian luasan RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan agar pembagian luasan RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Tabel 2.53
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Luas Kawasan Perkotaan	Luas RTH	Rasio RTH* 6=5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pacitan	138,992.00	7,710.80	2,290.53	0.2971
2	Ponorogo	130,570.00	5,119.91	463.00	0.0904
3	Trenggalek	114,722.00	6,116.00	1,313.00	0.2147
4	Tulungagung	105,565.00	29,934.00	2,410.00	0.0805
5	Blitar	133,648.00	29,790.00	3,276.00	0.1100
6	Kediri	138,605.00	15,090.00	2,115.00	0.1402
7	Malang	353,065.00	14,440.92	3,277.00	0.2269
8	Lumajang	179,090.00	5,728.01	32.49	0.0057
9	Jember	309,234.00	73,038.00	8,034.68	0.1100
10	Banyuwangi	578,240.00	15,323.33	1,839.00	0.1200
11	Bondowoso	152,597.00	2,315.80	2,157.50	0.9316
12	Situbondo	166,987.00	17,672.00	1,591.00	0.0900
13	Probolinggo	169,621.00	3,779.75	255.00	0.0675
14	Pasuruan	147,402.00	19,086.00	5,725.94	0.3000
15	Sidoarjo	63,438.00	14,425.30	2,452.75	0.1700
16	Mojokerto	71,783.00	2,665.00	725.00	0.2720
17	Jombang	111,509.00	3,640.00	585.00	0.1607
18	Nganjuk	122,425.00	7,140.00	2,345.20	0.3285
19	Madiun	103,758.00	2,026.40	1,381.00	0.6815
20	Magetan	68,884.00	17,407.10	5,222.13	0.3000
21	Ngawi	129,598.00	40,472.00	12,142.50	0.3000
22	Bojonegoro	219,879.00	10,362.71	3,108.83	0.3000
23	Tuban	183,415.00	12,439.49	4,882.52	0.3925
24	Lamongan	178,205.00	2,951.00	183.00	0.0620
25	Gresik	119,125.00	554.29	166.45	0.3003
26	Bangkalan	100,144.00	8,885.00	1,988.67	0.2238
27	Sampang	123,308.00	26,568.00	7,879.50	0.2966
28	Pamekasan	79,224.00	25,035.00	7,736.00	0.3090
29	Sumenep	199,854.00	35,966.67	10,790.00	0.3000
30	Kota Kediri	6,340.00	6,340.00	820.00	0.1293
31	Kota Blitar	3,257.00	3,257.00	836.00	0.2567
32	Kota Malang	14,528.00	14,528.00	224.52	0.0155
33	Kota Probolinggo	5,667.00	5,667.00	173.00	0.0305
34	Kota Pasuruan	3,529.00	3,529.00	274.64	0.0778
35	Kota Mojokerto	1,647.00	1,647.00	329.60	0.2001
36	Kota Madiun	3,392.00	3,392.00	350.00	0.1032
37	Kota Surabaya	35,054.00	35,054.00	6,610.00	0.1886
38	Kota Batu	13,674.00	13,674.00	144.62	0.0106
TOTAL		4.779.975	542.770,48	106.131.07	0,1955

Sumber: Rekapitulasi RTRW Kabupaten/ Kota Se Jatim (*Angka bersifat sementara)

Kondisi ruang terbuka hijau di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 19,55% dan mengalami kenaikan 19,07% dibandingkan tahun 2011. Perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang hanya menunjang keindahan kota tetapi diharapkan dengan menambah luasan RTH eksisting dapat menunjang kualitas lingkungan hidup perkotaan, karena itu tidak diperkenankan untuk menggunakan lokasi peruntukan RTH yang sudah ada. Keberadaan luasan kawasan RTH yang sudah ada diharapkan dapat menjadi stimulus munculnya RTH-RTH baru dikawasan perkotaan lainnya, oleh karena itu maka lokasi RTH baru dipersyaratkan tersebar pada lahan strategis dikawasan perkotaan.

2.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur secara nasional tercatat sebagai provinsi dengan kualitas perencanaan terbaik, hal ini perlu dikembangkan hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga kualitas perencanaan pembangunan di Jawa Timur merata ke seluruh penjuru provinsi.

Dari data yang telah dihimpun sampai dengan tahun 2013 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah menetapkan dengan Peraturan Daerah sebanyak 34 atau 89.49 persen dan yang belum sebanyak 4 atau 10.51 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Peraturan Daerah sebanyak 36 atau 94.73 persen dan dengan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 2 atau 5.27 persen.

2.1.3.1.7 Perhubungan

1. Jumlah armada angkutan umum

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Pengelolaan Armada Angkutan umum merupakan alternatif pembenahan transportasi yang jika dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi perkotaan. Selama periode 2009-2013, terjadi peningkatan Perusahaan pariwisata yang cukup tinggi yang diikuti dengan penambahan armada pariwisata yang tinggi pula

Tabel 2.54
Perkembangan Armada Angkutan Umum Di Jawa Timur

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	ANGKUTAN KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)						
	Perusahaan	Perusahaan	63	64	64	68	69
	Kendaraan / Armada	Unit	1.632	1.860	1.149	1.673	1.713
2	ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)						
	Perusahaan	Perusahaan	149	151	143	144	136
	Kendaraan / Armada	Unit	4.021	4.032	3.732	3.700	3.826
3	ANGKUTAN PARIWISATA						
	Perusahaan	Perusahaan	146	167	187	200	240
	Kendaraan / Armada	Unit	962	1.035	1.874	1.396	1.663
4	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT						
	Perusahaan	Perusahaan	32	35	36	37	41
	Kendaraan / Armada	Unit	122	149	166	174	199
5	ANGKUTAN SEWA						
	Perusahaan	Perusahaan	12	13	14	16	17
	Kendaraan / Armada	Unit	36	48	50	114	182

6	Taxi						
	Perusahaan	Perusahaan	8	8	8	8	11
	Kendaraan / Armada	Unit	1.010	1.013	1.013	973	977
7	Mobil Penumpang Umum (MPU) / Mikrolet / Mikrobus						
	Kendaraan / Armada	Unit	10.359	10.351	10.354	6.471	6.471

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

2. Prasarana Pengawasan Pengendalian Angkutan Barang dan Penumpang

Keberadaan Jembatan Timbang sangat dibutuhkan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan dengan cara menimbang kendaraan barang/truk untuk diketahui berat kendaraan beserta muatannya, sehingga Pemerintah dapat mengawasi perkembangan permintaan dan penawaran jenis barang / komoditi yang diangkut.

Tabel 2.55
Jumlah Prasarana Pengawasan Pengendalian Angkutan Barang Dan Penumpang LLAJ Di Jawa Timur

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Jembatan Timbang	Unit	20	20	20	20	20
2.	Jumlah UPT LLAJ	Unit	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Selama 5 tahun tidak ada penambahan jumlah jembatan timbang maupun UPT-nya. Mengingat tingginya jumlah armada angkutan besar, sudah saatnya UPT Jembatan Timbang di Jawa Timur dilengkapi dengan fasilitas jembatan timbang modern dan terkoneksi langsung dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dispenda Jawa Timur maupun Jawa Tengah dan Bali serta Kementerian Perhubungan, agar secara otomatis menimbang kendaraan yang lewat untuk informasi dan perencanaan kebijakan kedepan yang lebih baik.

3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Perkembangan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Jawa Timur pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 225 buah menjadi 1.750. Peningkatan tersebut berdampak pada kenyamanan dan keamanan transportasi di jalan.

Tabel 2.56
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	225	960	1.750

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

4. Perkembangan Jumlah Alarm Early Warning System (AEWS) Terpasang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System) di perlintasan rel Kereta Api (KA) yang tidak berpalang pintu. Perkembangan jumlah alarm early warning system (AEWS) terpasang di Jawa Timur periode 2009-2013 menunjukkan peningkatan berturut-turut, yaitu 49 (2009); 87 (2010); 104 (2011); 120 (2012); dan 145 (2013). Peningkatan ini menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.

Tabel 2.57
Data Perkembangan Jumlah Alarm Early Warning System (Aews) Terpasang

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	DAOP 7 Madiun	Titik	13	43	48	53	62
2	DAOP 8 Surabaya	Titik	25	25	30	35	41
3	DAOP 9 Jember	Titik	11	19	26	32	42
JUMLAH		Titik	49	87	104	120	145

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup

1. Kualitas Air Sungai

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Perubahan kondisi kualitas air pada aliran sungai merupakan dampak dari buangan dari penggunaan lahan yang ada. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, tegalan dan permukiman serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu Daerah Aliran Sungai. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri,

rumah tangga, dan pertanian akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai. Perkembangan kualitas air sungai selama periode 2009-2013, menunjukkan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 5.26 mg/l menjadi 3.60 mg/l dan COD dari 19.28 mg/l menjadi 10.92 mg/l.

Tabel 2.58
Kualitas Air Sungai di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Kualitas Air Sungai (Mg/l)	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
BOD	5.26	5.12	4.41	4.33	3.6
COD	19.28	17.94	15.45	13.64	10.92

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jatim

2.1.3.1.9 Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Kepemilikan sertifikat telah diatur dalam Undang-Undang Agraria 1960 yang menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap orang. Ada dua jaminan kepastian hak atas tanah, yang pertama adalah orang atau pemilik tanah, sedangkan yang kedua adalah objek atau tanah. Bagi pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk memasang tanda batas dan memelihara tanah tersebut.

Data dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, pada tahun 2012 luas lahan bersertifikat di Jawa Timur seluas 1.704 Km2, dengan demikian rasio luas lahan bersertifikat di Jawa Timur adalah 36,14 persen, hal ini berarti luas lahan yang bersertifikat di Jawa Timur mendekati 37 persen.

Tabel 2.59
Rekap Penyelesaian Sertipikasi Hak Atas Tanah oleh
Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012
1.	Penyelesaian Sertipikasi Hak Atas Tanah yaitu :					
	- HM (Hak Milik)	Buah	328,259	181,980	157,124	206,028
	- HGB (Hak Guna Bangunan)	Buah	125,455	32,702	37,681	33,259
	- HP (Hak Pakai)	Buah	2,671	703	1,194	1,288
	- HGU (Hak Guna Usaha)	Buah	-	14	347	212
	- HPL (Hak Pengelola Lahan).	Buah	57	37	7	-
JUMLAH		Buah	456,442	215,436	196,353	240,787

Sumber : BPN Provinsi Jawa Timur

2.1.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP elektronik berbasis NIK merupakan upaya pemerintah yang sangat strategis untuk menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dalam terbangunnya database kependudukan lengkap dan akurat untuk mewujudkan Administrasi Kependudukan.

Penerapan KTP elektronik atau e-KTP merupakan salah satu dari 3 Program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi Pemutakhiran data penduduk, Penerbitan dan pemberian NIK bagi seluruh penduduk, serta Penerapan KTP elektronik atau e-KTP, yang sekaligus juga merupakan penjabaran visi untuk mewujudkan “tertib administrasi kependudukan di tahun 2015”.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, pelaksanaan e-KTP di Jawa Timur hingga tahun 2012 mencapai 87 persen. Dari 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur baru 5 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan perekaman data hingga 100 persen, yaitu Kota Batu, Mojokerto, Kediri, kabupaten Tulungagung dan Lumajang. Sedangkan tahun 2013, pelaksanaan e-KTP mencapai 88.05 persen

2. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, pada tahun 2011 rasio pasangan yang berakte nikah terhadap rumah tangga di Jawa Timur sekitar 3,33 persen dan pada tahun 2012 sekitar 2,47 persen (data sampai bulan September 2012). Pasangan berakte nikah yang dimaksud di sini adalah pasangan baru yang mendapat akte nikah.

Tabel 2.60
Perkembangan Rasio Pasangan berakte Nikah
di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Tahun	Jumlah Pasangan yang Berakte Nikah	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)
2009	390.103	3,49
2010	368.979	3,55
2011*)	351.463	3,33
2012**)	264.086	2,50

Sumber : Dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kab/Kota Se Jawa Timur

Keterangan : *) Angka diperbaiki

**) Angka sementara, data sampai dengan bulan September 2012

Bila diperhatikan dari jumlah pasangan baru berakte nikah yang semakin menurun selama 4 tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: umur awal pernikahan yang semakin meningkat sehingga jumlah pernikahan menurun serta mahal nya biaya pernikahan.

3. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.

Tabel 2.61
Perkembangan Status Kepemilikan Akta Kelahiran
di Jawa Timur Tahun 2012-2013

No	Status Kepemilikan Akta Kelahiran	Thn 2012		Thn 2013	
		JIWA	%	JIWA	%
1	Memiliki Akta Kelahiran	6.935.493	59,97	7.555.157	65,67
2	Belum memiliki Akta Kelahiran	4.630.229	40,03	3.949.793	34,33

Sumber : Disnakertrasduk Provinsi Jatim

Pada tahun 2012, penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran berjumlah 11.565.722 orang, penduduk memiliki Akta Kelahiran berjumlah 6.935.493 orang (59,96 persen), sedangkan penduduk belum memiliki Akta Kelahiran berjumlah 4.630.229 orang (40,03 persen). Di tahun 2013, penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran berjumlah 11.504.950 orang, yang memiliki Akta Kelahiran berjumlah 7.555.157 orang (65,67 persen), dan penduduk belum memiliki Akta Kelahiran 3.949.793 orang (34,33 persen).

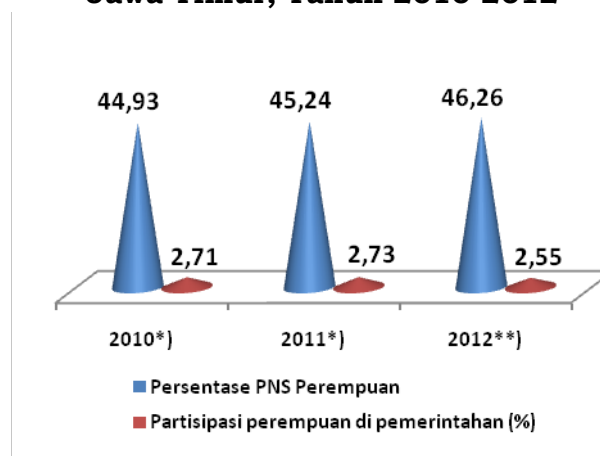
2.1.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Saat ini perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal. Dalam bidang politik, perempuan memiliki jatah 30% dalam kursi parlemen. Meskipun saat ini, jatah tersebut belum terisi secara maksimal. Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 53 telah mensyaratkan partai politik menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka di Pemilu 2009.

Selama 2 periode terakhir, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Jawa Timur masih kurang dari 30 persen. Akan tetapi, sudah terlihat adanya peningkatan wakil perempuan sebagai anggota DPRD Tingkat II di Jawa Timur dalam periode 2009-2014. Jumlah anggota DPRD perempuan pada periode 2004-2009 hanya sekitar 9,17 persen dan angka ini mengalami peningkatan menjadi sekitar 15,38 persen pada periode 2009-2014. Peningkatan ini diduga antara lain adanya penggantian anggota antar waktu (PAW), keterbukaan masyarakat kewajiban memenuhi kuota 30 persen perempuan di Pemilu 2009.

Gambar 2.32
Grafik Perempuan di Pemerintahan
Jawa Timur, Tahun 2010-2012



Sumber : BKN Jawa Timur

Keterangan : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Pada bidang pemerintahan, peranan perempuan antara lain tercermin dari keterlibatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dari tahun ke tahun, jumlah PNS perempuan semakin meningkat, hal ini bisa dilihat dari persentase PNS perempuan terhadap jumlah seluruh PNS pada tahun 2010 sekitar 44,93% dan terus meningkat menjadi 46,26% pada tahun 2012. Selain itu partisipasi perempuan di pemerintahan dapat ditunjukkan dari besarnya persentase PNS perempuan di antara pekerja perempuan. Selama tiga tahun terakhir partisipasi perempuan di pemerintahan menunjukkan angka sekitar 2 persen, ini berarti masih sedikit perempuan Jawa Timur yang bekerja sebagai PNS.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perkembangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2009-2013 berfluktuatif, dimana pada tahun 2009 mencapai 529 kasus dan menurun menjadi 443 kasus pada tahun 2010. Selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 673 kasus dan pada tahun 2012-2013 terus menurun masing-masing 476 kasus menjadi 278 kasus. Semakin banyaknya lembaga pengawasan KDRT menjadi salah satu faktor turunnya kasus KDRT di Jawa Timur.

Tabel 2.62
Perkembangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	529	443	673	476	278

Sumber : Polda Jatim

2.1.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program.

Tabel 2.63
Jumlah Akseptor Yang Terlayani Untuk
Pemasangan Alat Kontrasepsi di Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Alat Kontrasepsi	Tahun	
		2012	2013
1	Implant	78 set	793 set
2	IUD Kit	982 set	100 set
3	Pil KB	4328 blester	-
4	KB Suntik	8360 vial	-
Jumlah		4258 Akseptor	793 Akseptor

Sumber : BPPKB Provinsi Jawa Timur

Selama dua tahun terakhir perkembangan alat kontrasepsi yang tersedia pada tahun 2012 sejumlah 78 set implant, 982 set IUD Kit, 4328 blester Pil KB dan 8360 vial KB suntik untuk 4258 Akseptor, sedangkan untuk tahun 2013 sebanyak 793 set implant dan 100 set IUD Kit untuk 793 akseptor.

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Tingkat kesejahteraan dengan kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 adalah kategori keluarga yang dinyatakan sebagai keluarga miskin, atau dinyatakan dengan Proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori pra sejahtera dan Sejahtera I dari seluruh keluarga yang didata tingkat kesejahteraannya. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

Secara umum perkembangan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada kurun waktu 2009-2013 menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2009 keluarga pra sejahtera sebanyak 2,682,715 orang, kemudian menjadi 2,475,128 pada tahun 2013. Demikian juga untuk keluarga sejahtera I, yaitu tahun 2009 sebanyak 2,454,567 orang menjadi 2,352,609 pada tahun 2013.

Tabel 2.64
Perkembangan Keluarga Sejahtera
di Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Keluarga Pra Sejahtera	2,682,715	2,612,776	2,538,009	2,547,138	2,475,128
2.	Keluarga Sejahtera I	2,454,567	2,284,471	2,317,963	2,329,272	2,352,609
3.	Keluarga Sejahtera II	2,629,813	2,851,311	2,939,327	2,983,915	3,074,494
4.	Keluarga Sejahtera III	2,675,255	2,791,609	2,862,760	2,919,421	2,973,480
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	481,488	532,732	543,549	570,374	589,469
Jumlah		10,923,838	11,072,899	11,201,608	11,350,120	11,465,180

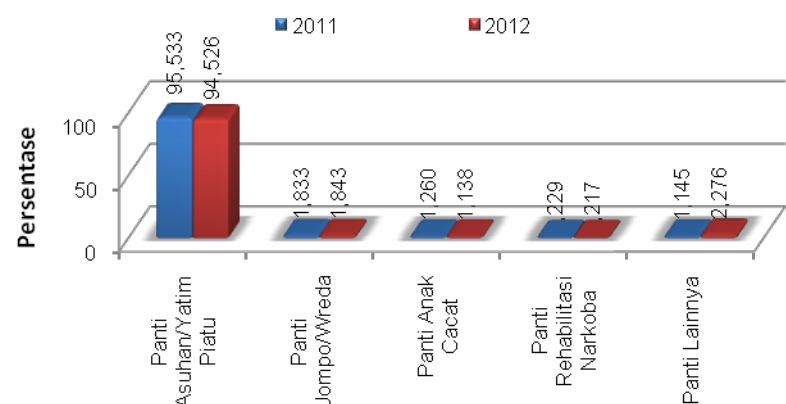
Sumber : BPPKB Provinsi Jawa Timur

2.1.3.1.13 Sosial

1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi

Keberadaan panti sosial sebagai sarana pengembangan, pemulihan, bimbingan dan latihan serta terapi ditujukan untuk menciptakan kemandirian agar dapat mendorong penerima manfaat dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 2.33
Grafik Persentase Panti Sosial Menurut Jenisnya di Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: Dinas Sosial Kab/Kota Se Jawa Timur

2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Berbagai faktor penyebab keberadaan PMKS antara lain kemiskinan, bencana alam dan marginalisasi.

Tabel 2.65
Jumlah PMKS Mendapat Bantuan di Jawa Timur Tahun 2009-2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	478.233	297.934	278.327	334.292	537.998
2	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	1.378.033	1.590.149	1.625.431	1.985.529	1.215.675
3	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	34,70	18,74	17,12	16,84	44,26

Sumber: Dinas Sosial Kab/Kota Se Jawa Timur

Dalam kurun waktu 2009-2012, pertumbuhan PMKS yang mendapat bantuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 jumlah PMKS yang mendapat bantuan mengalami sebesar 34,70 persen dan selama periode 2010-2013 mengalami penurunan berturut-turut yaitu 18,74 persen (2010); 17,12 persen (2011); 16,84 persen (2012); dan 44,26 persen (2013).

3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di suatu wilayah membutuhkan penanganan segera. Upaya ini dilakukan agar efek sosial yang lebih besar dapat dihindari. Di antara permasalahan sosial yang ada di antaranya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pemerintah berusaha seoptimal mungkin untuk menanggulangi PMKS. Upaya tersebut ditempuh dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara normal.

Tabel 2.66
Jumlah PMKS di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Jml PMKS yang tertangani	358.441	293.242	284.650	363.705
2	Jml PMKS yang ada	2.228.147	2.417.452	2.568.850	3.996.795
3	Persentase Penanganan PMKS	16,09	12,13	11,08	9,10

Sumber : Dinas Sosial Kab/Kota Se Jawa Timur

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, jumlah PMKS yang tertangani mencapai 363.705 jiwa di tahun 2012. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 27,77 persen dari pada tahun 2011. Sementara itu jumlah PMKS selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, penanganan PMKS sebesar 16,09 persen. Angka ini menunjukkan setiap 100 penyandang PMKS yang ada 16 PMKS yang sudah tertangani. Penanganan PMKS selama 4 tahun terakhir menunjukkan persentase penurunan. Hal ini diduga, pertumbuhan PMKS lebih cepat dari pada kemampuan keuangan pemerintah dalam hal melaksanakan pembinaan.

2.1.3.1.14 Ketenagakerjaan

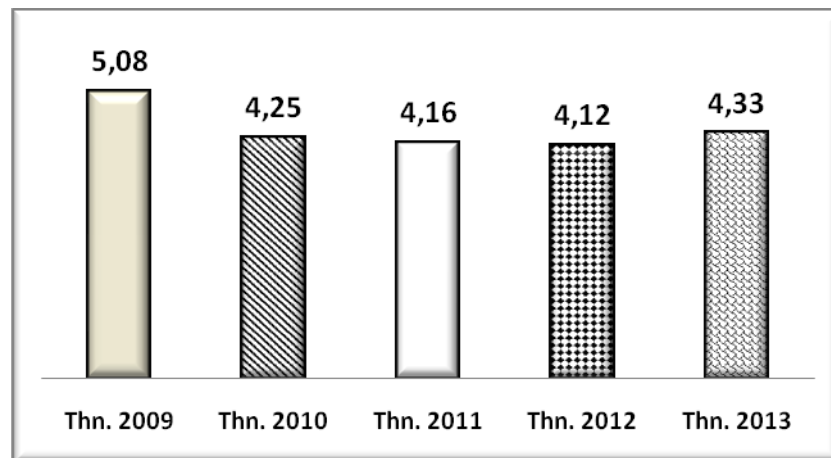
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan

pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2012 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai sebanyak 19,901 juta orang atau bertambah sebesar 139,672 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2011 sebesar 19,761 juta orang.

Gambar 2.34
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,88 persen atau 19,81 juta. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (TPT) sebesar 4,12 persen atau 819,563 ribu orang pada tahun 2012, relatif lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2011 yang mencapai 4,16 persen atau 821,546 ribu orang. Sedangkan kondisi tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,33 atau 871.000 orang persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 20,137 juta orang.

Capaian TPT tahun 2012 dan 2013 tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2009-2014 sebesar 5,60 – 5,80 persen, yang artinya “melampaui target”. Penurunan TPT ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan beberapa sinergi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan 2013 cukup mampu menyerap tenaga pengangguran. Dalam upaya mengatasi ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur menetapkan landasan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan melalui 4 kebijakan program yaitu Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Perluasan dan Penempatan Kerja.

Tabel 2.67
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

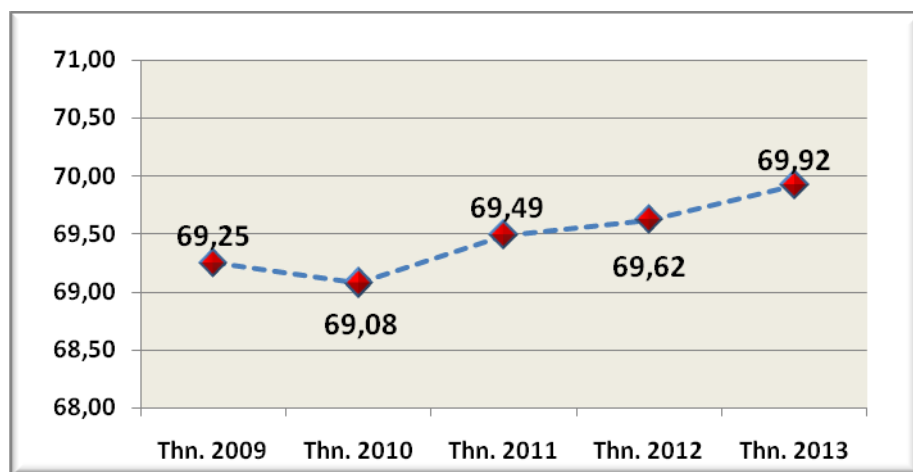
Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kabupaten					
01. Pacitan	1,32	0,87	2,70	1,16	1,00
02. Ponorogo	3,45	3,83	4,37	3,26	3,28
03. Trenggalek	3,91	2,15	3,18	3,14	4,12
04. Tulungagung	4,54	3,50	3,58	3,18	2,77
05. Blitar	3,00	2,24	3,61	2,86	3,74
06. Kediri	5,10	3,75	4,54	4,16	4,70
07. Malang	6,35	4,49	4,63	3,79	5,20
08. Lumajang	2,24	3,17	2,70	4,70	2,06
09. Jember	4,42	2,71	3,95	3,91	3,97
10. Banyuwangi	4,05	3,92	3,71	3,40	4,69
11. Bondowoso	2,88	1,59	2,84	3,75	2,05
12. Situbondo	2,28	3,13	4,74	3,31	3,07
13. Probolinggo	2,60	2,02	3,20	1,98	3,32
14. Pasuruan	5,03	3,49	4,83	6,43	4,35
15. Sidoarjo	10,19	8,35	4,75	5,21	4,13
16. Mojokerto	5,54	4,84	4,31	3,42	3,13
17. Jombang	6,19	5,27	4,24	6,69	5,60
18. Nganjuk	3,98	3,64	4,73	4,22	4,75
19. Madiun	6,04	5,55	3,37	4,16	4,70
20. Magetan	3,82	2,41	3,16	3,86	3,02
21. Ngawi	4,49	4,80	4,06	3,05	5,06
22. Bojonegoro	4,52	3,29	4,18	3,51	5,82
23. Tuban	4,22	2,86	4,15	4,25	4,33
24. Lamongan	4,92	3,62	4,40	4,98	5,00
25. Gresik	7,01	7,70	4,36	6,72	4,51
26. Bangkalan	5,01	5,79	3,91	5,32	6,84
27. Sampang	1,70	1,77	3,91	1,78	4,74
28. Pamekasan	2,18	3,53	2,89	2,30	2,19
29. Sumenep	2,27	1,89	3,71	1,19	2,55
Kota					
30. Kediri	8,32	7,39	4,93	7,85	8,00
31. Blitar	8,47	6,66	4,20	3,55	6,22
32. Malang	10,44	8,68	5,19	7,68	7,72
33. Probolinggo	8,53	6,85	4,66	5,12	4,52
34. Pasuruan	7,57	7,23	4,92	4,34	5,34
35. Mojokerto	9,30	7,52	5,86	7,32	5,69
36. Madiun	11,27	9,52	5,15	6,71	6,66
37. Surabaya	8,63	6,84	5,15	5,07	5,28
38. Batu	6,88	5,55	4,57	3,41	3,32
Jawa Timur	5,08	4,25	4,16	4,12	4,33

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja. TPAK juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Gambar 2.35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data BPS Agustus 2013 (hasil Sakernas 2011-2013) jumlah angkatan kerja di Jawa Timur sebesar 20.137 juta, dengan jumlah yang berkerja sebesar 19.266 juta dan penganggurnya sebesar 871 ribu. Sedangkan TPAK-nya sebesar 69,92 % artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, 69 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Angka TPAK di Jawa Timur sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 menunjukkan kecenderungan meningkat, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena ada 4 (empat) hal, yaitu (1) perselisihan hak, (2) perselisihan kepentingan, (3) perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta (4) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Tabel 2.68
Keaadaan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang Masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial serta Kasus Mogok/Unjuk Rasa

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Perselisihan Hak	Kasus	29	77	72	11	15
2.	Perselisihan Kepentingan	Kasus	11	50	25	4	5
3.	Perselisihan PHK	Kasus	177	463	284	125	128
4.	Perselisihan Antar SP/SB dlm 1 Perusahaan	Kasus	1	2	1	0	0
5.	Mogok Unjuk Rasa	Kasus	24	56	31	22	11
Jumlah		Kasus	242	648	413	162	159

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur

Perselisihan hubungan industrial yang tidak bisa diselesaikan di tingkat perusahaan ataupun Kab./Kota sehingga masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tahun 2012 terdapat 140 kasus (didominasi perselisihan PHK sebanyak 125 kasus atau 89,29 persen). Sedang pada tahun 2013, kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial tercatat sebanyak 148 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen dibanding tahun sebelumnya (terbanyak adalah perselisihan PHK sebanyak 128 kasus atau 86,49 persen). Sedangkan kejadian mogok/unjuk rasa di Jawa Timur menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013, terjadi mogok/unjuk rasa sebanyak 11 kejadian atau mengalami penurunan sebesar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 22 kejadian.

2.1.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

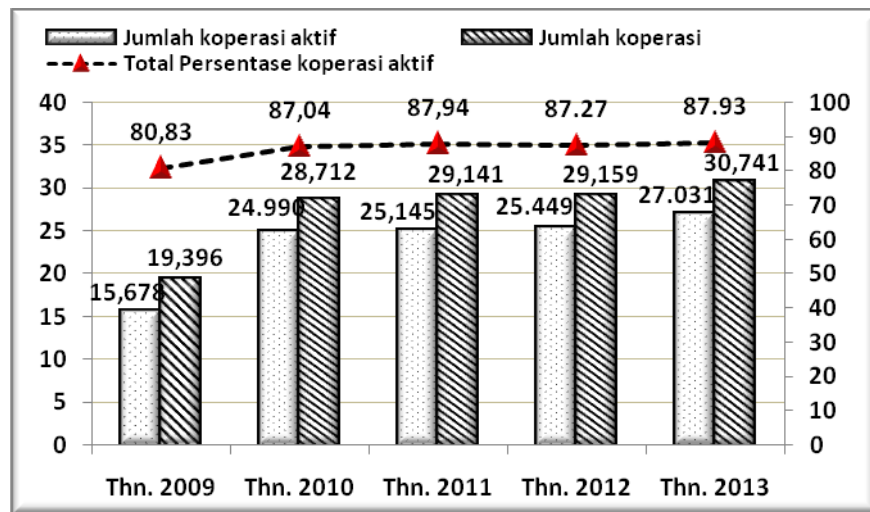
Persentase koperasi aktif adalah proporsi jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.69
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2009-2013 Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah koperasi aktif	15.678	24.990	25.145	25.449	27.031
2	Jumlah koperasi	19.396	28.712	29.141	29.159	30.741
3	Total Persentase koperasi aktif	80,83	87,04	87,94	87,27	87,93

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

Gambar 2.36
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

Sejak tahun 2010, jumlah koperasi di Jawa Timur mengalami peningkatan yang tajam dari 19.396 koperasi menjadi 30.741 koperasi pada tahun 2013. Hal ini terjadi karena pembentukan koperasi wanita yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM). Tetapi dari jumlah koperasi yang ada belum semuanya aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2011, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur sebanyak 25.145 unit dari 29.141 unit koperasi yang ada atau sebesar 87,94 persen dari total koperasi. Sementara pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif sebanyak 25.449 koperasi dari total 29.159 koperasi atau sebesar 87,27 persen, dan tahun 2013 jumlah koperasi aktif meningkat kembali menjadi 27.031 koperasi dari total 30.741 koperasi atau sebesar 87,93 persen. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

2.1.3.1.16 Penanaman Modal

1. Perkembangan ICOR

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, hasil penghitungan ICOR tahun 2009 mencapai angka 3,59. Sementara dari tahun 2010 sampai tahun 2011 masing-masing angka ICOR sebesar 3,28 dan 3,01. Sedangkan pada tahun 2012 ICOR Jawa Timur mencapai 2,92. Secara umum ICOR negara-negara sedang berkembang berkisar antara 2,0 sampai 5,0. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Jawa Timur cukup efisien.

Tabel 2.70
Nilai ICOR Jawa Timur
Tahun 2009-2012

Tahun	ICOR
2009	3,59
2010	3,30
2011	3,09
2012	2,92

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2012 angka ICOR Jawa Timur sebesar 2,92, artinya untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 2,92 unit. Dibandingkan dengan ICOR tahun sebelumnya yang mencapai 3,01, maka dapat dikatakan bahwa setiap penambahan 1 unit output memerlukan investasi sebesar kurang lebih 3,01 unit. Pernyataan di atas dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2011 diperlukan investasi sebesar 3,01 milyar rupiah. Sedangkan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2012 diperlukan investasi sebesar 2,92 milyar rupiah. Hal ini merupakan indikasi efisiensi permodalan Jawa Timur cukup tinggi.

2. Kinerja Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Kinerja penanaman modal di Jawa Timur menunjukkan hasil yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi PMDN pada tahun 2009 sebesar 4,29 trilyun rupiah meningkat sebesar 54,32 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2008. Peningkatan nilai realisasi

tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2013 yang mencapai 34,85 trilyun rupiah. Kondisi serupa juga terjadi pada realisasi PMA meskipun pada tahun 2009 terjadi perlambatan dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2010 realisasi PMA tumbuh cepat dari 3,8 trilyun rupiah menjadi 16,73 trilyun atau meningkat sebesar 340,26%. Pertumbuhan PMA terus berlanjut sampai dengan tahun 2013 hingga mencapai 33,63 trilyun rupiah.

Tabel 2.71
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Realisasi Investasi
Tahun 2009 – 2013

Tahun	PMDN		PMA	
	Nilai (trilyun rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (trilyun rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	4,29	54,32	3,80	-7,77
2010	9,59	123,54	16,73	340,26
2011	20,33	111,99	20,07	19,96
2012	28,73	41,32	25,13	25,21
2013	34,85	21,30	33,63	33,82

Sumber: Badan Penanaman Modal

Persetujuan izin prinsip menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2009-2010 izin prinsip PMDN menunjukkan pertumbuhan yang relatif cepat dari 25,41 trilyun rupiah menjadi 41,01 trilyun rupiah, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 26,23 trilyun rupiah kemudian naik lagi menjadi 46,31 trilyun rupiah dan kembali menurun menjadi 38,95 trilyun rupiah pada tahun 2013. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan izin prinsip PMA, mengalami peningkatan yang signifikan pada kurun waktu 2010-2011 dari 18,45 trilyun rupiah menjadi 44,68 trilyun rupiah atau meningkat 142,17%. Peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun 2012, bahkan terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 30,4 trilyun rupiah. Pada tahun 2013 persetujuan izin prinsip PMA meningkat tinggi menjadi 210,8 trilyun rupiah.

Tabel 2.72
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Izin Prinsip Investasi
Tahun 2009 – 2013

Tahun	PMDN		PMA	
	Nilai (trilyun rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (trilyun rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	25,41	27,62	14,05	-39,39
2010	41,01	61,39	18,45	31,32
2011	26,23	-36,04	44,68	142,17
2012	46,31	76,55	30,4	-31,96
2013	38,95	-15,89	210,8	593,42

Sumber: Badan Penanaman Modal

Berdasarkan data realisasi investasi dan persetujuan ijin prinsip menunjukkan adanya *lag* investasi yang cukup besar. Pada tahun 2009 ijin prinsip PMDN yang disetujui sebesar 25,41 trilyun rupiah namun yang melakukan realisasi hanya 4,29 trilyun rupiah. Kondisi yang sama terjadi pada PMA, total ijin prinsip yang dikabulkan sebesar 14,05 trilyun rupiah sedangkan realisasinya hanya 3,8 trilyun rupiah.

2.1.3.1.17 Kebudayaan

1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

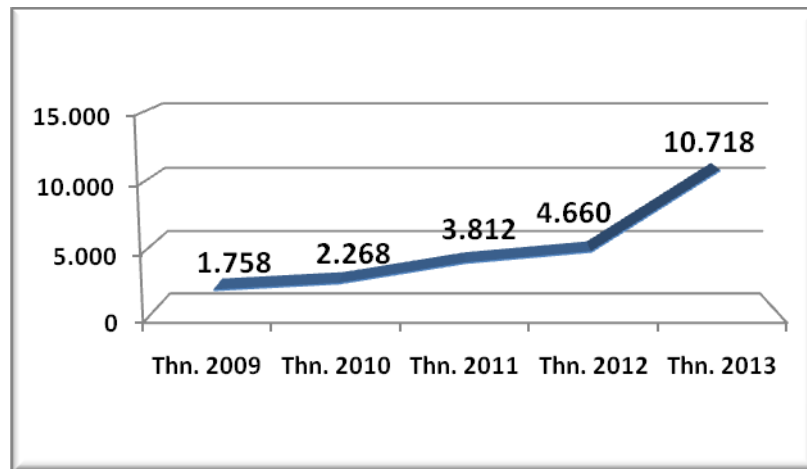
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikenal istilah Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, sedangkan situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu dan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pada tahun 2009 situs dan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 8.231 unit, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 10.213 unit.

2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

1. Lapangan Olahraga

Apabila memperhatikan peran serta pemuda dalam bidang olahraga cukup besar, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur pun senantiasa mendukung kegiatan tersebut agar pemuda semakin bisa menyalurkan bakat-bakat yang dimilikinya. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga baik secara fisik maupun non fisik. Fasilitas secara fisik ini berkaitan dengan memperbanyak sarana dan prasana, seperti lapangan olahraga umum, ruang terbuka hijau, stadion, bahkan gelanggang. Sementara itu, fasilitas non fisik berkaitan dengan membentuk organisasi olahraga, memperbanyak tenaga pelatih ahli maupun guru olahraga.

Gambar 2.37
Jumlah Lapangan Olahraga
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : Dispora Provinsi Jawa Timur

Keseriusan pemerintah dalam mendukung kegiatan olahraga pemuda, dapat diketahui dari semakin bertambahnya jumlah lapangan olahraga selama kurun waktu lima terakhir ini. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga menunjukan pada tahun 2009 terdapat sebanyak 1.758 unit lapangan, kemudian terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi 10.718 unit.

2. Pelatihan Organisasi Pemuda

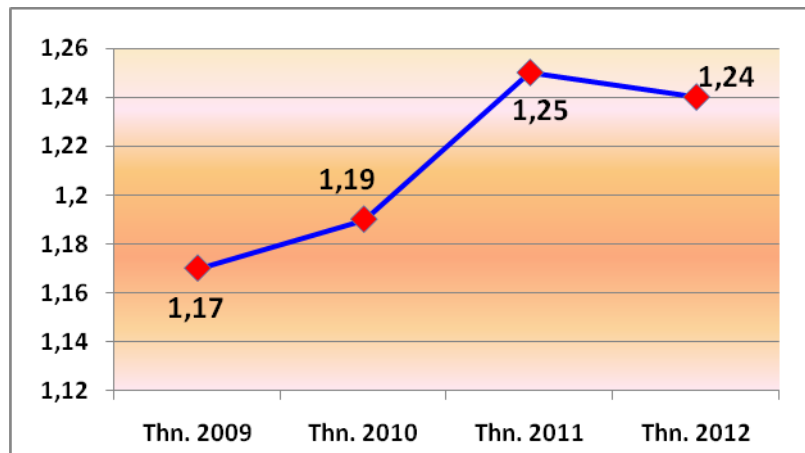
Organisasi kepemudaan adalah lembaga non formal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Anggota dari Organisasi tersebut tentu saja adalah para pemuda dan pemudi. Organisasi kepemudaan lebih mengarah kepada kegiatan sosial karena merupakan wujud kesadaran untuk membantu sesama. Meningkatnya pengetahuan pemuda sesuai fungsi, tanggungjawab dan perannya dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan kondisi masyarakat sehingga mewujudkan tenaga muda yang handal dan cakap untuk memimpin lembaga kepemudaan yang dapat mengembangkan organisasi dan menggerakkan SDM yang ada didalamnya. Pada tahun 2012, pelaksanaan pelatihan organisasi pemuda dilakukan sebanyak 821 pelatihan dan tahun 2013 sebanyak 228 pelatihan

2.1.3.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja, sejak didirikannya pada tahun 1950 sampai saat ini telah mengemban tugas pelayanan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Gambar 2.38
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2012



Sumber : Bakesbangpol Kab/Kota Se Jatim
Catatan : *) Angka Sementara (data dari 34 Kab/Kota)

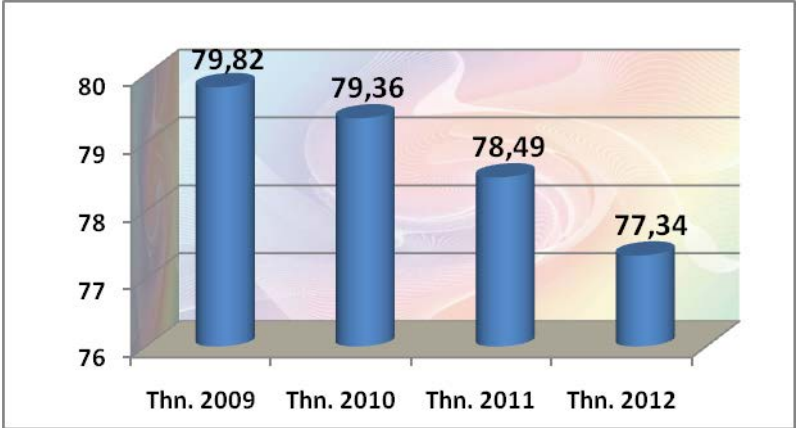
Berdasarkan data dari Bakesbangpol di 34 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, rasio polisi pamong praja pada tahun 2012 per 10.000 penduduk sebesar 1,24 atau dengan kata lain dalam 100.000 penduduk terdapat sekitar 12 orang Satpol PP yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Angka rasio ini terlihat sangat kecil bila dibandingkan dengan tugas yang diemban sangatlah berat.

2. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Perlindungan Masyarakat (Linmas) seringkali hanya dikaitkan dengan fungsi linmas dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Berkaitan dengan fungsi dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat maka satlinmas menjadi pendukung utama pihak kepolisian atau malah menjadi garda terdepan dalam tata kehidupan masyarakat secara umum baik di desa maupun di perkotaan.

Data dari Bakesbangpol di 32 Kab/Kota Se Jawa Timur menunjukkan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk pada tahun 2012 sebesar 77,34. Angka tersebut berarti sekitar 77 orang Linmas bertugas membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk 10.000 penduduk dalam suatu wilayah.

Gambar 2.39
Rasio Jumlah Linmas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

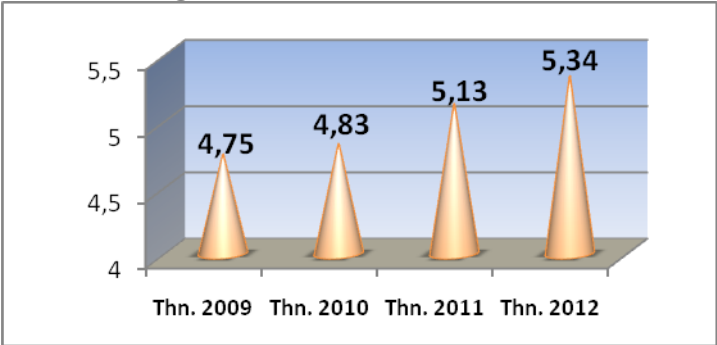


Sumber : Bakesbangpol Kab/Kota Se Jatim
Catatan : *) Angka Sementara (data dari 32 Kab/Kota)

3. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama setiap warga negara. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Pengertian siskamling secara umum adalah suatu kegiatan atau upaya untuk mencegah gangguan kamtibmas, yang dikembangkan oleh Polri dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan peduli serta meningkatkan kepekaan dan daya tangkal masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

Gambar 2.40
Rasio Pos Siskamling di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012



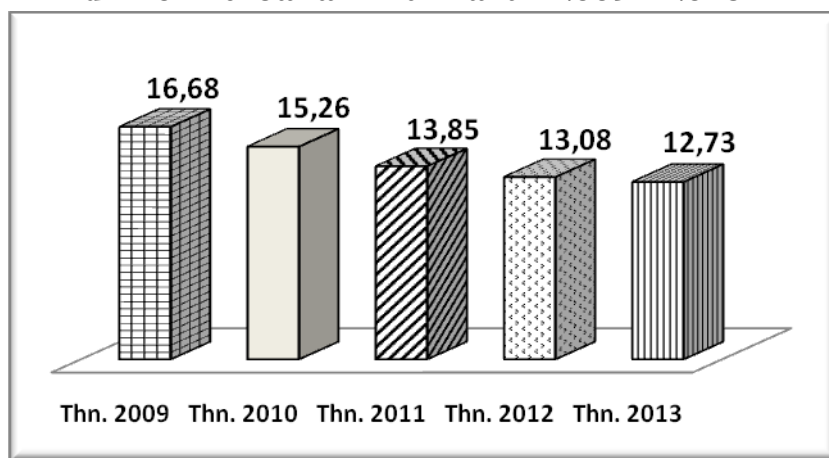
Sumber : Bakesbangpol Kab/Kota Se Jatim
Catatan : *) Angka Sementara (data dari 19 Kab/Kota)

Berdasarkan data dari Bakesbangpol di 19 Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur, selama 5 tahun terakhir rasio jumlah Pos Siskamling terus menunjukkan peningkatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak pula pemukiman penduduk yang memerlukan pos siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Pada tahun 2012 rasio jumlah pos siskamling per jumlah desa adalah sebesar 5,34. Hal ini berarti di setiap desa di Jawa Timur terdapat sekitar 5 Pos Siskamling.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta diukur berdasarkan pengeluaran mereka di bawah garis kemiskinan. Fenomena kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Jawa Timur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Jawa Timur

Gambar 2.41
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama lima tahun terakhir secara gradual (2009 – 2013) menunjukkan trend penurunan. Penurunan angka kemiskinan memberikan pengaruh pula kepada jumlah penduduk di atas garis kemiskinan. Pada tahun 2009 angka kemiskinan sebesar 16,68 persen atau dengan jumlah penduduk sebesar 6.022,59 ribu jiwa, kemudian mengalami penurunan yang cukup dratis hingga menjadi 12,73 persen atau jumlah penduduk sebesar 4.865,82 jiwa di tahun 2013.

Penurunan persentase kemiskinan tersebut tidak terlepas dari beberapa program kebijakan pemerintah Jawa Timur melalui sinergitas dengan pelaku ekonomi untuk menurunkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur, maka dapat diindikasikan adanya keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur.

5. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Pelayanan prima merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur pemerintah selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media masa maupun langsung kepada unit pelayanan, baik menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten sehingga tida menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih adanya praktek pungutan tidak resmi. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta adanya tuntutan reformasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pemenuhan untuk mendapatkan pelayanan yang baik merupakan hak masyarakat dan sebaliknya bagi aparatur berkewajiban memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Tabel 2.73
Persentase Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	40,64	57,36	50,59	80,42

Selama kurun waktu 2009-2012 banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang berhasil diselesaikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semakin tinggi nilai persentase penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat berarti masyarakat semakin terlayani haknya oleh aparatur negara sebagai penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan jumlah unit pelayanan publik di Jawa Timur semakin meningkat berkat partisipasi masyarakat, serta terwujudnya unit pelayanan yang berprestasi, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2009-2013

Indikator Kinerja	Capaian kinerja Program				
	Satuan	2009	2010	2011	2012
1. % Unit pelayanan Provinsi yang memiliki SPP	%	54	63	71	85
2. % unit pelayanan Pemerintah Kab./Kota yang memiliki SPP	%	67	78	86	100
3. % SKPD yang melakukan survey IKM	%	5	7	8	10
4. % Kab./Kota yang melakukan survey IKM	%	9	10	12	16
5. % Kab./Kota yang telah melaksanakan SPM	%	69	72	77	86
6. Jumlah unit pelayanan percontohan Provinsi dan Kab./Kota	Unit	11	13	16	20
CAPAIAN RATA-RATA (%)		66,19	67,50	67,00	66,00

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Capaian Kinerja Peninngkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2009 sebesar 66,19%, pada tahun 2010 sebesar 67,5%, pada tahun 2011 sebesar 67% dan pada tahun 2012 sebesar 66%. capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik didukung dengan kegiatan optimalisasi pelayanan publik. kegiatan optimalisasi pelayanan publik pada tahun 2013 dilakukan dengan rapat evaluasi dan pelaksanaan SPM bidang perhubungan dan bidang penanaman modal daerah Provinsi Jawa Timur.

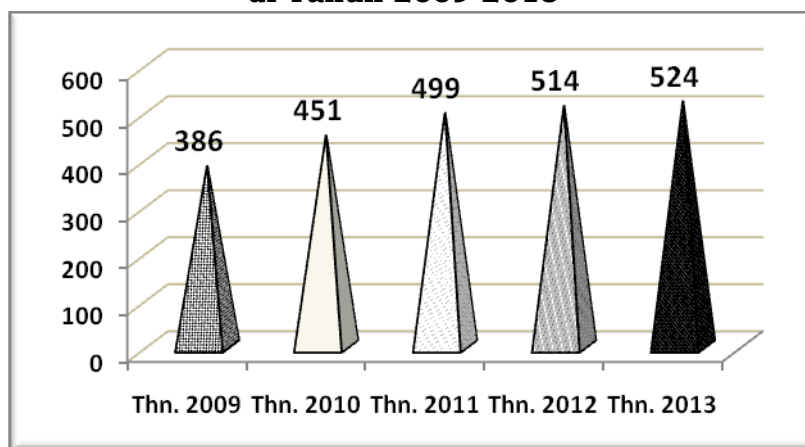
2.1.3.1.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Jumlah LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya

Gambar. 2.42
Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
di Tahun 2009-2013



Sumber : Bakesbangpol Prov. Jatim

Jumlah LSM di Jawa Timur, pada tahun 2011 tercatat 386 LSM dan meningkat menjadi 524 LSM pada tahun 2013. Ini berarti jumlah LSM dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 138 LSM. Besarnya kenaikan LSM dari tahun ke tahun ini diduga LSM yang bersangkutan sudah melaporkan kepada instansi terkait (Bakesbangpol) tentang keberadaanya dan didukung dengan bukti pendirian akta notaries.

2.1.3.1.21 Kearsipan

1. Jumlah SDM Pengelola Kearsipan

Tujuan kearsipan sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Selaras dengan tujuan kearsipan sebagaimana tersebut, maka kearsipan dapat disebut sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa yang dapat menjadi sumber informasi yang obyektif menyangkut ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna.

Tabel 2.75
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Jumlah SDM pengelola kearsipan	210	201	120	366	150

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur

*Ket : *) Angka Sementara*

Jumlah SDM pengelola kearsipan pada tahun 2009-2013 berfluktuasi, dimana tahun 2009-2011 angkanya tetap yaitu mencapai 210 pengelola, kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 366 pengelola dan angka sementara pada tahun 2013 mencapai 150 pengelola. Mengingat pentingnya kearsipan sebagai wahana pelestari dan sumber informasi maka urusan kearsipan membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan membutuhkan keahlian khusus. Hal ini menjadi salah satu permasalahan terkait pengelolaan kearsipan di Jawa Timur, dimana SDM yang terdapat di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur masih belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

2.1.3.1.22 Komunikasi dan Informasi

1. Jumlah Jaringan Komunikasi

Komunikasi selalu terjadi diantara sesama manusia baik itu perorangan maupun kelompok. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan handphone (HP) dan telepon.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini telepon rumah biasa dan handphone menjadi alternative masyarakat dalam berkomunikasi. Hal itu disebabkan oleh kemudahan dalam menggunakan alat tersebut, tanpa harus bertemu bertatap muka, maupun mengirim surat. Dengan menggunakan media tersebut segala sesuatu yang penting akan mudah diketahui dengan cepat. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat Jawa Timur yang lebih memilih untuk menggunakan telepon rumah biasa dan handphone (HP) untuk berkomunikasi.

Tabel 2.76
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Alat Komunikasi Telepon dan HP di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Alat Komunikasi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Telepon	10,76	8,54	7,49	5,40	6,14
HP	65,20	74,36	75,69	80,11	85,06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Menurut data BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa selama empat kurun tahun terakhir masyarakat yang menggunakan telepon terus-menerus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 10,76 persen penduduk yang menggunakan telepon, hingga tahun 2012 hanya terdapat sebanyak 5,40 persen penduduk. Akan tetapi, di tahun 2013 jumlah penduduk Jawa Timur yang menggunakan telepon mulai kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,14 persen.

2. Televisi dan Radio Lokal

Derasnya arus globalisasi menuntut kecepatan dalam setiap proses pertukaran informasi. Kebutuhan komunikasi antar individu, institusi dan komunikasi public menjadi terasa sebagai kebutuhan pokok. Untuk itu, diperluka sarana komunikasi yang menghubungkan banyak pihak di hampir seluruh wilayah secara cepat, berkapasitas besar, jelas, dan jernih, Sarana komunikasi yang kini ada, tiba-tiba dirasakan perlu dikembangkan secara drastis, salah satunya seperti perkembangan televisi dan radio.

Berkenaan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, yang kemudian di tindak lanjuti dengan munculnya UU nomor 32/2002 tentang penyiaran, ternyata memberikan implikasi pada berkembangnya dunia pertelevisian di Indonesia semakin banyak pula stasiun televisi yang bermunculan. Jumlah penyiaran pertelevisian di Jawa Timur selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 88 lembaga penyiaran, dan tahun 2013 menjadi sebanyak 116 lembaga penyiaran.

Tabel 2.77
Data Lembaga Penyiaran Sekretariat (KPID) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2013

Televisi							
No.	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013 *)
1.	LPS - TV Lokal Analog	Lembaga Penyiaran	48	48	48	48	57
2.	LPS - TV Sistem Stasiun Berjaringan (SSJ)	Lembaga Penyiaran	31	32	32	32	22
3.	LPS - TV Lokal Digital	Lembaga Penyiaran	0	2	2	2	2
4.	LPPL - TV	Lembaga Penyiaran	2	2	2	2	3
5.	LPK - TV	Lembaga Penyiaran	1	1	1	1	3
6.	LPB - TV	Lembaga Penyiaran	6	10	17	17	29
Jumlah			88	95	102	102	116

Sumber : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Jatim
Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Tabel 2.78
Data Lembaga Penyiaran
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013

Radio							
No.	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013 *)
1.	LPS - Existing	Lembaga Penyiaran	81	81	81	85	85
2.	LPS	Lembaga Penyiaran	170	171	171	193	213
3.	LPPL	Lembaga Penyiaran	34	34	36	38	37
4.	LPK	Lembaga Penyiaran	73	88	116	227	254
Jumlah			358	374	404	543	589

Sumber : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Jatim
Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Ternyata perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada dunia pertelevisian saja, tetapi juga dirasakan pada dunia radio local di Jawa Timur. Lembaga penyiaran radio juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni terdapat sebanyak 589 lembaga di tahun 2013, dibandingkan tahun 2009 hanya terdapat 358 lembaga penyiaran radio. Meningkatnya perkembangan teknologi TV dan Radio saat ini berpengaruh juga di Indonesia khususnya di Jawa Timur dari tingkat perdesaan sampai perkotaan telah dapat mengetahui kejadian-kejadian di belahan dunia lain. Meningkatnya perkembangan tersebut dapat dilihat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7 persen.

3. Website Milik Pemerintah Daerah

Perkembangan pemanfaatan website dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir tahun 2013 dari 71 SKPD sudah 59 SKPD yang mempunyai website. Untuk

perkembangan Pemerintah Kab/kota se Jatim dari 38 kab/kota sudah semuanya memiliki website sebanyak 38 kab/kota.

Tabel 2.79
Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2012 – 2013

No.	Komponen	Tahun		
		Satuan	2012	2013
1.	Pengembangan Pengelolaan Website Pemprov	Website	56	122
		domain	42	100
2.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK	kali/peserta	360	413

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim

Penggunaan nama domain go.id juga sudah dilakukan sebagian besar SKPD, dari 59 website SKPD ada 51 website telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain go.id. Untuk SKPD yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 sebanyak 8 website SKPD

Jumlah pengunjung website www.jatimprov.go.id rata-rata 13.056.924 pengunjung sampai bulan Desember sedangkan jumlah pengunjung website kominfo-jatimprov.go.id rata-rata 10.027.772 pengunjung sampai bulan Desember.

4. Pameran/Expo Bidang Komunikasi dan Informatika

Selama ini pertahun terdapat 10 kali kegiatan pameran yang dilaksanakan di Jawa Timur, diantaranya terdapat Pameran memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diikuti berbagai komponen terutama oleh pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur, Pameran Pelayanan Publik, Pekan KIM, Pameran Jatim Expo, Pameran Jatim Fair.

Tabel 2.80
Pameran/Expo Bidang Komunikasi dan Informatika Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

Komponen	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Pameran/expo	Kali	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim

Terselenggaranya pameran/Expo Jawa Timur diharapkan agar mapu terciptanya citra pemerintah yang proaktif mempromosikan dan membina para UKM di wilayahnya untuk dipromosikan ketingkat

nasional. Selain itu, pemerintah yang berkepentingan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada dunia usaha, masyarakat luas maupun berbagai pihak mengenai kesiapan dalam menghadapi ACFTA. Disamping itu, diadankannya pameran mampu dijadikan sebagai sarana bagi perusahaan produsen dan pengusaha kecil menengah UKM untuk mempromosikan hasil produk dan jasa secara efektif dan efisien.

Terselenggaranya Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Pelayanan Publik se-Dunia / Hari Pelayanan Publik Internasional, yang diikuti oleh unit-unit pelayanan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota dan BUMN / BUMD di Jawa Timur. Pengunjung berasal dari seluruh lapisan masyarakat di provinsi Jawa Timur, mulai dari Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, pelaku bisnis, pemerhati pelayanan publik, media pemberitaan lokal dan nasional, civitas akademika, serta masyarakat umum. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa saat ini penyelenggara pelayanan publik di Jawa Timur telah berubah dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, maka hasil-hasil pelayanan dan kemajuan yang telah di capai selama ini perlu di informasikan kepada publik melalui Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur.

2.1.3.1.23 Perpustakaan

1. Jumlah Pemustaka

Pemustaka adalah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya). Ada berbagai jenis pemustaka seperti mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat bergantung pada jenis perpustakaan yang ada. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2009 – 2013), jumlah pemustaka di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2009 sebanyak 500.000 orang meningkat menjadi 1.224.733 tahun 2012 dan pada tahun 2013 (angka sementara) mencapai 261.805 orang.

Tabel 2.81
Jumlah Pemustaka di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013*)
Jumlah Pemustaka	500.000	607.303	866.294	1.224.733	261.805

Sumber : Badan Perpus dan Arsip Provinsi Jawa Timur
Ket : *) Angka Sementara

2.1.3.1.24 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76%), menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sementara kapasitas produksi pangan pertumbuhannya lambat bahkan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air disamping itu stagnannya pertumbuhan produktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Pengembangan pangan lokal dan tradisional merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan alternatif masyarakat Jawa Timur, mengingat konsumsi pangan penduduk Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok pangan sereal terutama beras. Ketersediaan Pangan tahun 2013 untuk beras sebesar 7.039.527 ton, Daging sebesar 352.004 ton, ikan 1.368.868.8 ton dan gula 1.240.050 ton .

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadangan pangan nasional. Sebagai provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga.

Penurunan konsumsi beras merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan adanya Program Percepatan Penganekaragaman Pangan, kita dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian. Mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengukuran Skor PPH untuk tahun 2013 sebesar 80,0 dan untuk tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur tahun 2013 sebesar 88,6 Kg/Kap/thn.

Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup aman dengan distribusi lancar.

2.1.3.1.25 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Jumlah Ormas/LSM/Parpol Terdaftar

Semenjak gerbang reformasi dibuka, keran kebebasan mengucur deras. Masyarakat mulai hafal pada hak asasi manusia, hak berkumpul dan berbicara, serta hak sejahtera. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Model pengorganisasian masyarakat ini terbagi menjadi tiga element, yaitu Ormas, LSM, Parpol. Dalam dua tahun terakhir, jumlah Ormas, LSM, Parpol menunjukkan peningkatan, yaitu dari 845 pada tahun 2013 menjadi 873 pada tahun 2012.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Pertanian

1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Komiditi beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Pada pembangunan di Jawa Timur, beras menjadi suatu komoditas strategis dan politis dikarenakan keberadaannya menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Tabel 2.82
Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Padi
Di Jawa Timur Menurut Subround , Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013 (ASEM)
1. Luas Panen (ha)					
- Januari – April	1.015.125	954.592	1.020.369	1.016.682	1.023.479
- Mei – Agustus	649.564	677.127	651.657	692.942	690.934
- September - Desember	240.141	332.264	254.770	266.095	334.282
- Januari - Desember	1.904.830	1.963.983	1.926.796	1.975.719	2.048.695
2. Produktivitas (ku/ha)					
- Januari – April	60,00	60,93	55,89	62,04	59,79
- Mei – Agustus	58,34	56,28	48,82	59,52	56,24
- September - Desember	57,45	60,71	66,44	66,4	64,01
- Januari - Desember	59,11	59,29	54,89	61,74	59,28

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013 (ASEM)
3. Produksi (ton)					
- Januari - April	6.090.264	5.815.944	5.702.413	6.307.444	6.119.284
- Mei - Agustus	3.789.296	3.810.657	3.181.432	4.124.461	3.885.886
- September - Desember	1.379.526	2.017.172	1.692.698	1.766.802	2.139.803
- Januari - Desember	11.259.086	11.643.773	10.576.543	12.198.707	12.144.973

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Memperhatikan tabel diatas dapat diketahui bahwa produksi padi di Jawa Timur pada tahun 2013 mengalami penurunan, yakni mencapai 59,28 persen. Meskipun begitu, selama periode 2009-2013 produksi padi mampu melebihi 10 juta ton GKG per tahunnya. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menyelenggarakan program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional). Pada program tersebut, Jawa Timur menargetkan mampu mencapai produksi beras sebanyak 1 juta ton. Kenaikan produksi pada tahun tersebut berkat kebijakan pemerintah pusat yang mencanangkan program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional). Propinsi Jawa Timur dalam program P2BN tersebut ditargetkan untuk mencapai produksi beras mencapai 1 juta ton. Secara umum tahun 2009-2013 produksi padi cenderung meningkat hanya di tahun 2011 dan 2013 yang mengalami penurunan.

2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Sektor pertanian terdiri atas sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dari hasil penghitungan tahun 2013 total nilai PDRB sektor pertanian sebesar Rp. 169,43 triliun atau dengan kontribusi sebesar 14,91 persen terhadap total nilai PDRB Jawa Timur. Apabila dilihat pada masing-masing subsektor, penyumbang terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan sebesar 7,75 persen, disusul subsektor peternakan 2,93 persen dan subsektor perkebunan 1,94 persen.

Tabel 2.83
Struktur Perekonomian Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 (%)

Sektor/Subsektor	Tahun				
	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1. Pertanian	16,34	15,75	15,39	15,42	14,91
1.1. Tanaman Bahan Makanan	8,73	8,37	8,08	8,05	7,75
1.2. Tanaman Perkebunan	2,18	2,07	2,04	2,03	1,94
1.3. Peternakan	3,07	2,99	3,00	3,01	2,93
1.4. Kehutanan	0,29	0,33	0,35	0,41	0,40
1.5. Perikanan	2,07	1,99	1,92	1,92	1,88
2. Pertambangan Dan Penggalian	2,22	2,19	2,24	2,08	2,00
3. Industri Pengolahan	28,14	27,49	27,13	27,11	26,60
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,55	1,51	1,44	1,35	1,29
5. Konstruksi	4,01	4,49	4,67	4,55	4,74
6. Perdag., Hotel Dan Restoran	28,42	29,47	30,00	30,40	31,34
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	5,50	5,52	5,66	5,70	5,94
8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	4,83	4,9	4,93	5,05	5,10
9. Jasa - Jasa	9,00	8,68	8,54	8,34	8,09
PDRB Jawa Timur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka Diperbaiki

*) Angka Sementara

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB atau perekonomian Jawa Timur semakin menurun. Hal ini lebih disebabkan karena sektor pertanian khususnya subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tanaman perkebunan sangat tergantung pada minat masyarakat untuk tetap bertani dan ketersediaan lahan pertanian yang semakin menurun akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan fisik sektor lainnya.

3. Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, tanaman obat-obatan, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan

perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, minyak sawit, inti sawit, tebu, rami, serat manila dan tanaman lainnya.

Hasil penghitungan PDRB tahun 2013 atas dasar harga berlaku total nilai sub sektor perkebunan di Jawa Timur sebesar Rp. 22,06 triliun atau dengan kontribusi sebesar 1,94 persen terhadap total nilai PDRB. Apabila dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir kontribusi subsektor perkebunan cenderung terus mengalami penurunan. Secara berurutan kontribusinya tahun 2009 sebesar 2,18 persen, tahun 2010 sebesar 2,07 persen, tahun 2011 sebesar 2,04 persen, tahun 2012 sebesar 2,03 persen dan tahun 2013 sebesar 1,94 persen.

2.1.3.2.2 Kehutanan

1. Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Subsektor kehutanan mencakup kegiatan yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha penanaman, pemeliharaan dan penebangan kayu, serta pengambilan hasil hutan lainnya. Dari hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 telah diketahui bahwa nilai PDRB subsektor kehutanan sebesar Rp. 4,59 triliun atau sebesar 0,40 persen terhadap total PDRB Jawa Timur.

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi subsektor ini cenderung meningkat. Secara berurutan kontribusinya tahun 2009 sebesar 0,29 persen, tahun 2010 sebesar 0,33 persen, tahun 2011 sebesar 0,35 persen, tahun 2012 sebesar 0,41 persen dan tahun 2013 sebesar 0,40 persen. Meningkatnya kontribusi subsektor kehutanan tiga tahun terakhir tersebut lebih disebabkan karena meningkatnya produksi/panen kayu.

2.1.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari subsektor pertambangan migas, pertambangan non migas dan subsektor penggalian.

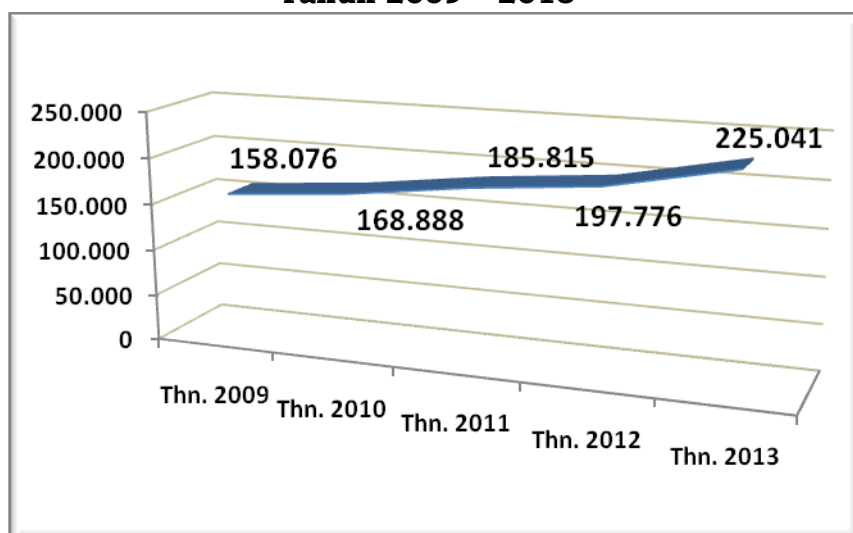
Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan cenderung stagnan. Secara berurutan kontribusinya tahun 2009 sebesar 2,22 persen, tahun 2010 sebesar 2,19 persen; tahun 2011 sebesar 2,24 persen; tahun 2012 sebesar 2,03 persen; tahun 2013 sebesar 2,00 persen.

2.1.3.2.4 Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata di Indonesia, khususnya untuk wisatawan manca negara (wisman). Dalam setiap tahunnya jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur terus meningkat. Pada tahun 2012 kenaikan wisman yang berkunjung ke Jawa Timur mencapai 6,44 persen, yaitu dari 185.815 wisman di tahun 2011 menjadi 197.776 wisman di tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah wiswan yang berkunjung menunjukkan peningkatan, yaitu mencapai 255.041 wisman.

Gambar 2.43
Jumlah Kunjungan Wisman ke Jawa Timur
Tahun 2009 – 2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisman yang datang ke Jawa Timur tetap merasa nyaman.

2.1.3.2.5 Kelautan dan Perikanan
1. Produksi Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung. Produksi perikanan pada tahun 2009 sebesar 914.088,4 ton, meningkat pada tahun 2010 sebesar 21,80 persen menjadi 1.113.393,5 ton, kemudian dua tahun terakhir meningkat sebesar 9,48 persen dan 7,52 persen atau sebesar 1.218.897,8 ton pada tahun 2011, sebesar 1.310.604,2 ton pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 1.368.868,80 ton .

Tabel 2.84
Produksi Perikanan di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Produksi Perikanan	914,088.40	1,113,393.50	1,218,897.80	1,310,976.20	1,368,868.80

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dianalogikan dengan produksi Perikanan Tangkap di laut, dimana kelompok ini kontribusinya terhadap produksi perikanan total juga semakin menurun. Dalam empat tahun terakhir, kontribusi produksi kelompok ini tahun 2009 sebesar 43,27 persen, 30,44 persen tahun 2010, tahun 2011 29,75 persen, 28,06 persen tahun 2012 dan 27,87 persen tahun 2013.

Tabel 2.85
Persentase Produksi Perikanan Laut terhadap Produksi Total Tahun 2009-2013

Tahun	Volume (Ton)		%
	Perikanan Laut	Produksi Total	
2009	395.511,0	914.088,4	43,27
2010	338.915,2	1.113.393,5	30,44
2011	362.621,6	1.218.897,8	29,75
2012	367.921,1	1.310.976,6	28,06
2013	378.227,1	1.356.649,2	27,87

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur

2.1.3.2.6 Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Secara geografis Jawa Timur merupakan wilayah yang dikenal sebagai center of gravity yang menarik wilayah lain untuk transit dan bertansaksi di wilayah ini. Besarnya aktivitas transit dan bertransaksi inilah yang memberikan nilai tambah pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Nilai tambah bruto Sektor perdagangan, hotel dan restoran (atas dasar harga berlaku) tahun 2013 sebesar Rp 356,10 triliun, atau setara dengan 31,34 persen dari total nilai PDRB Jawa Timur, merupakan kontributor terbesar dibanding 8 sektor/lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan sektor PHR tahun 2012 sebesar 10,06 persen, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,81 persen. Untuk tahun 2013 karena terjadinya gejolak ekonomi global yang terjadi dari wilayah Eropa dan Amerika mempengaruhi kinerja pertumbuhan sektor PHR Jawa Timur hingga melamban mencapai 8,61 persen.

Tabel 2.86
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	22.71	23.58	23.94	24.32	31.34

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Fenomena pengaruh pasar global terhadap kinerja perdagangan di Jawa Timur mengindikasikan belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri serta kurangnya promosi dan kerjasama diantara pelaku usaha perdagangan. Fenomena ini ternyata juga berpengaruh terhadap fluktuasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

2. Perdagangan Antar Provinsi

Perdagangan antarpulau atau yang lebih dikenal dengan perdagangan antarprovinsi adalah perdagangan komoditi dari suatu daerah ke daerah lain, baik melalui jalan darat, laut, maupun udara. Komoditi yang diperjualbelikan dalam perdagangan antarpulau adalah hasil-hasil bumi yang telah melalui proses pengolahan, maupun yang belum mengalami proses pengolahan. Pembukaan Kantor Perwakilan dagang di 11 provinsi juga telah memberikan dukungan yang besar kepada peningkatan perdagangan antar

wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan ekspor antar pulau dari 301.488 triliun rupiah di tahun 2012 menjadi 346.022 triliun di tahun 2013. Ini menunjukkan adanya peningkatan senilai 44.534 triliun rupiah atau peningkatan sebesar 14,77% dengan neraca perdagangan perdagangan antar provinsi tahun 2013 adalah 62.855 triliun rupiah.

2.1.3.2.7 Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena disamping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang relatif banyak. Hasil penghitungan tahun 2013 total nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku sebesar Rp 302,31 triliun, atau setara dengan 26,60 persen dari total nilai PDRB Jawa Timur. Pertumbuhan sektor ini di tahun 2013 sebesar 5,59 persen, melamban dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,34 persen.

Apabila dilihat perkembangan strukturnya dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor industri di Jawa Timur cenderung menurun, masing-masing sebesar 28,14 persen pada tahun 2009, tahun 2010 sebesar 27,49 persen, tahun 2011 sebesar 27,12 persen, tahun 2012 sebesar 27,11 persen dan tahun 2013 sebesar 26,60 persen. Sektor ini didominasi oleh kontribusi subsektor industri makanan, minuman dan tembakau 57,31 persen (terhadap sektor NTB sektor Industri) atau sebesar 15,25 persen terhadap total nilai PDRB Jawa Timur, dengan pertumbuhan sebesar 6,07 persen.

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri mempunyai peran yang sangat penting baik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi maupun dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tujuan pembangunan industri diarahkan pada upaya untuk memperkuat struktur ekonomi Jawa Timur dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor, mampu meningkatkan daya tahan perekonomian Jawa Timur, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Tabel 2.87
Jumlah Industri di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Perusahaan/Industri	716.441	742.671	783.178	796.537	799.168
Pertumbuhan (%)	2,00	3,66	5,45	1,71	0,33

Sumber: Dinas Perindag Provinsi Jatim

Jumlah industri di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,63 persen. Dalam kurun waktu 2009-2013 tersebut, tercatat jumlah industri pada tahun 2009 sebanyak 716.441 perusahaan, tahun 2010 menjadi 742.671 perusahaan, tahun 2011 menjadi 783.955 perusahaan, tahun 2012 berkembang menjadi 796.515 perusahaan serta pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 799.168 perusahaan.

2.1.3.2.8 Ketransmigrasian

1. Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) merupakan prakarsa transmigran atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan, dan dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok. Sedangkan Transmigrasi Umum (TU) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.

Pada tahun 2012 penempatan TU sebanyak 619 KK/1.861 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 penempatan TU berjumlah 766 KK/2.250 jiwa atau naik 23,75 persen untuk jumlah KK dan 20,90 persen untuk jumlah jiwa. Sementara itu terkait penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), pada tahun 2012 penempatan TSM berjumlah 50 KK/146 jiwa, sedangkan untuk tahun 2013 penempatan TSM berjumlah 31 KK/100 jiwa atau turun 38 persen untuk jumlah KK dan 31,51 persen untuk jumlah jiwa.